

Respons Majalah *Suara Muhammadiyah* terhadap Kebijakan Ekonomi

Presiden Soeharto, 1966-1974



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga untuk
Memenuhi Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Oleh:

Emi Mu'taziroh
NIM: 11120034

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Emi Mu'taziroh

NIM : 11120034

Jenjang/Jurusan : S1/Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnoot atau daftar pustaka.

Yogyakarta, 15 November 2016

Saya Yang Menyatakan,



Emi Mu'taziroh
NIM: 11120034

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Adab dan
Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul: "Respons Majalah Suara Muhammadiyah terhadap Kebijakan Politik dan Ekonomi Presiden Soeharto, 1966-1974", yang ditulis oleh:

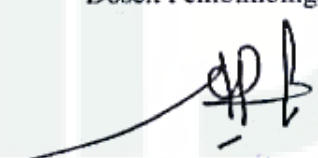
Nama : Emi Mu'taziroh
NIM : 11120034
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 15 November 2016

Dosen Pembimbing,


Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M. Hum
NIP 19630306 198903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-661/Un.02/DA/PP.00.9/12/2016

Tugas Akhir dengan judul : RESPONS MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH TERHADAP KEBIJAKAN EKONOMI PRESIDEN SOEHARTO, 1966-1974

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EMI MUTAZIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 11120034
Telah diujikan pada : Jumat, 25 November 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Prof. Dr. H Dudung Abdurrahman, M.Hum
NIP. 19630306 198903 1 010

Penguji I

Drs. Musa, M.Si
NIP. 19620912 199203 1 001

Penguji II

Zuhrotul Latifah, S.Ag. M.Hum.
NIP. 19701008 199803 2 001

Yogyakarta, 25 November 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
DEKAN



Prof. Dr. N. A. Wahid Khoiri, M.A.
NIP. 19600221 198803 1 001

MOTTO

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang lebih baik, Sesungguhnya Tuhan-mu, Dia-lah yang lebih baik mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.(Q. S. An-Nahl ayat 125)”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Almamater Tercinta Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam

Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

ABSTRAK

Pada awal pemerintahan Orde Baru, yaitu dalam kurun waktu antara 1966-1974 Presiden Soeharto mencanangkan program pembangunan dengan menekankan pada pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan yaitu dengan cara menumbuhkan stabilitas keamanan, baik secara nasional maupun regional. Hal ini menimbulkan reaksi berupa respons atau tanggapan dari masyarakat umum khususnya pers. Salah satu media cetak atau pers yang melakukan tanggapan itu adalah *Suara Muhammadiyah*. Ia merupakan organ resmi milik Muhammadiyah yang berperan sebagai alat komunikasi dari Muhammadiyah kepada anggota-anggotanya maupun pihak luar. Oleh karena itu, penting untuk diteliti respons *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan ekonomi Presiden Soeharto. Rumusan masalahnya adalah apa saja kebijakan ekonomi Presiden Soeharto?, bagaimana perkembangan *Suara Muhammadiyah* pada masanya?, dan bagaimana respons *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan Presiden Soeharto tersebut?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisa isi yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi dan sering digunakan untuk mengkaji pesan-pesan media. Dengan demikian pendekatan ini mengkaji isi secara kuantitatif yang mengandung asumsi bahwa frekuensi kejadian dari berbagai sifat isi itu sendiri dan merupakan faktor penting dalam proses komunikasi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sementara itu teori yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada beberapa konsep yaitu majalah *Suara Muhammadiyah* dan kebijakan. Metode penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup 4 tahapan yaitu *heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi*.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: *pertama*, kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Presiden Soeharto terdiri dari stabilisasi yang diikuti rehabilitasi ekonomi, kebijakan pembangunan, kebijakan harga dan pangan. *Kedua*, perkembangan *Suara Muhammadiyah* dalam rentang waktu tahun 1966 sampai tahun 1974 ditampilkan menjadi *Suara Muhammadiyah* Wajah dan Gaya Baru (WGB) dengan harapan menjadi majalah yang berbobot dan bermutu sehingga digemari warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum. *Ketiga*, respons *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan pemerintah tidak berupa kritikan yang menjatuhkan kekuasaan, tetapi kritikan yang membangun dan membantu pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya. Selain respons berupa kritikan, terdapat respons berupa dukungan yang dianggap oleh Muhammadiyah sesuai dengan prinsip ideologinya yaitu *amar ma'ruf nahi munkar* dan respons berupa penolakan yaitu tanggapan yang tidak sesuai dengan prinsip ideologi organisasi tersebut.

Kata kunci: *Suara Muhammadiyah*, respons, kebijakan ekonomi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ أَعْلَامِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur semoga tetap terhaturkan kepada kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, nabi sekaligus Rasul terakhir yang kita nantikan syafa'atnya di akhir zaman.

Skripsi yang berjudul “Respons Majalah *Suara Muhammadiyah* terhadap Kebijakan Ekonomi Presiden Soeharto, 1966-1974” merupakan upaya penulisan untuk memahami sejarah Suara Muhammadiyah. Penulisan skripsi ini tidak dapat terlaksana dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

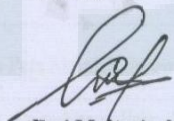
1. Bapak Hasanuddin dan Ibu Umi Azizah selaku kedua orang tua penulis, yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
4. Ketua, dan Sekretaris Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam.
5. Dr. Hj. Siti Maryam, M, Ag., selaku dosen Penasihat Akademik (PA).

6. Prof. Dr. H. Dudung Abdurahman, M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan arahan dan petunjuk yang sangat bernilai kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan segenap Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
8. Bapak Musthafa W. Hasyim dan Bapak Imron Nasri selaku responden yang telah memberikan banyak informasi dan data dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh teman-teman Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam yang senantiasa memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Semoga amal kebaikan dan jerih payah mereka semua mendapatkan imbalan dari Allah swt.

Yogyakarta, 15 November 2016

Penulis,



Emi Mu'taziroh
NIM 11120034

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xiii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Landasan Teori.....	12
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAHAN SOEHARTO TAHUN	
1966-1974	28
A. Stabilisasi dan Rehabilitasi Ekonomi.....	30
B. Kebijakan Pembangunan	36
C. Kebijakan Harga dan Pangan.....	40
BAB III PERKEMBANGAN <i>SUARA MUHAMMADIYAH</i> TAHUN	
1966-1974	49
A. Sejarah Lahirnya Yayasan Penerbitan Pers Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i>	49
B. Struktur dan Manajemen Yayasan Penerbitan Pers Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i>	52
1. Struktur Organisasi <i>Suara Muhammadiyah</i>	55
2. Manajemen Organisasi Redaksi Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i> ...	57

C. Berita tentang Perekonomian Indonesia di dalam <i>Suara Muhammadiyah</i>	66
1. Laporan Pemerintah kepada Rakyat.....	66
2. Penanaman Modal dan Bantuan Luar Negeri untuk Indonesi.....	70
3. Perkembangan Ekspor.....	72
4. Usaha Peningkatan Produksi Pertanian.....	72
5. Hasil Produksi Pertanian.....	73
6. Kerja Sama dalam Bidang Ekonomi.....	73
7. Kenaikan Harga-Harga dalam Negeri.....	73
8. Demonstrasi-Demonstrasi.....	77
9. Pasang Surut Bidang Industri.....	80
10. Usaha Pengolahan Sumber Alam.....	83
11. Masalah Pembangunan.....	84
12. Pembiayaan-Pembiayaan Negara.....	85
13. Proyek Pemerintah.....	88
D. Pemberitaan pada Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i>	89
1. Rapat Redaksi.....	90
2. Sumber Berita.....	90
3. Pengolahan Berita.....	91
4. Proses Produksi.....	91
5. Percetakan.....	92
BAB IV BENTUK TANGGAPAN <i>SUARA MUHAMMADIYAH</i> ATAS KEBIJAKAN PRESIDEN SOEHARTO.....	93
A. Respons Berupa Penolakan.....	93
1. Masalah Kenaikan Gaji.....	93
2. Masalah Pembangunan Ekonomi yang Mendiskreditkan Agama dan Ideologi.....	95
3. Masalah Kenaikan Harga Beras Akhir tahun 1972.....	96
B. Respons Berupa Dukungan.....	97
1. Dukungan terhadap Diturunkannya Harga.....	97
2. Mengamankan dan Mensukseskan Kebijakan Ekonomi Pemerintah.....	98
3. Masalah Repelita.....	99
4. Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah.....	99
C. Respons Berupa Kritikan.....	100
1. Mengatasi Masalah Krisis tahun 1966.....	101
2. Masalah Penurunan Harga dan Penstabilan Ekonomi.....	103
3. Memperbanyak Penerimaan Negara.....	104
4. Menaikkan Produksi.....	106
5. Masalah Memburuknya Keadaan Ekonomi Awal tahun 1968.....	107
6. Masalah Pengangguran.....	109
7. Masalah Repelita.....	109
8. Pembangunan Desa.....	110
9. Masalah Urbanisasi.....	113
10. Masalah Modernisasi Desa.....	114

11. Masalah Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Ekonomi.....	115
12. Masalah Pembentukan Modal bagi Masyarakat Desa	117
13. Masalah Kebangkrutan Perusahaan-Perusahaan di Kalimantan Barat	119
14. Masalah Demonstrasi	119
BAB V PENUTUP.....	122
A. Simpulan	122
B. Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	126
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	132
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	143



DAFTAR GAMBAR

Gambar I	: Struktur Yayasan Penerbitan Pers Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i> tahun 1965-1988	55
Gambar II	: Struktur Bidang Perusahaan Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i> tahun 1965-1988	56
Gambar III	: Struktur Organisasi Redaksi Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i> tahun 1965-1988	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Interview Guide	132
Lampiran II	: Halaman Muka Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i>	133
Lampiran III	: Contoh Artikel yang Berisi Penolakan Masalah Pembangunan Ekonomi yang Mendiskreditkan Agama dan Ideologi	134
Lampiran IV	: Contoh Artikel yang Berisi Dukungan dalam Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah.....	135
Lampiran V	: Contoh Artikel yang Berisi Kritikan tentang Masalah Pengangguran	137
Lampiran VI	: Contoh Berita tentang Kenaikan Harga Pupuk.....	138
Lampiran VII	: Artikel tentang Perkembangan Majalah <i>Suara Muhammadiyah</i> WGB.....	139
Lampiran VIII	: Contoh Tajuk Rencana <i>Suara Muhammadiyah</i> WGB.....	140
Lampiran IX	: Contoh Kolom Komentar di dalam <i>Suara Muhammadiyah</i>	141
Lampiran X	: Contoh Berita tentang Peristiwa 15 Januari 1974.....	142
Lampiran XI	: Artikel tentang Konsep Ampera di dalam <i>Suara Muhammadiyah</i>	143

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak abad ke-19, media cetak seperti surat kabar atau majalah merupakan bahan dokumenter yang sangat berharga. Sebagai sumber informasi, surat kabar tidak hanya memuat data yang menunjukkan fakta suatu peristiwa tetapi juga memuat opini, interpretasi dan pikiran-pikiran spekulatif. Dengan demikian penggunaan media cetak ini dapat memberikan pengaruh bagi pembacanya yang pada akhirnya digunakan sebagai kekuatan politik dan keagamaan sebagai sarana untuk mengaktualisasikan ide-ide dan kondisi yang ingin dicapainya.¹

Pada perkembangannya istilah ini diberi pengertian dengan penerbitan Pers. Pers telah menjadi sumber sejarah yang dapat direkonstruksi. Pers mempunyai kontribusi dalam pembentukan karakter bangsanya, mempunyai andil saat melawan kolonialisme dan berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa yang masih muda usianya. Demikian halnya dengan pers Islam, pers Islam muncul seiring dengan menguatnya semangat nasionalisme. Para perintis Pers Islam Indonesia, pada awalnya tumbuh sebagai akibat dari keterlibatan mereka dalam penerbitan-penerbitan milik Belanda.²

Kemunculan pers Islam dimulai pada awal abad ke-20, bersamaan dengan kelahiran dan penyebaran ide-ide reformasi yang berkembang di Timur

¹Aprini Erlina, "Sejarah Pertumbuhan Pers Islam Indonesia: Studi Kasus Panji Masyarakat Pada Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Hamka (1959-1981)", *Skripsi* (Jakarta: Jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Syarif Hidayatullah, 2006), tidak dipublikasikan, hlm. 2-3.

²*Ibid.*, hlm. 2.

Tengah, terutama dari Mesir. Penyebaran ini begitu luas hingga ke Jawa dan melahirkan gerakan *Jami'at Khair*. Para anggota organisasi ini kemudian menyebar dan mendirikan organisasinya sendiri, seperti K. H. Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah.³ Organisasi-organisasi tersebut membangun suatu iklim diskusi bagi pemikiran Islam dalam skala yang lebih luas dan memunculkan kebutuhan akan pers Islam. Organisasi inilah yang merintis majalah *Suara Muhammadiyah* sejak Januari 1915 M atau tahun 1333 H, 3 tahun setelah Muhammadiyah didirikan dan dideklarasikan (18 November 1912/18 Dzulhijah 1330 H).⁴ Semula bernama *Sworo Muhammadiyah* dengan persebarannya ke seluruh penjuru Nusantara dengan menggunakan bahasa Melayu, berjasa menyatukan Nusantara Indonesia sebelum Sumpah Pemuda diikrarkan oleh para pemuda di tahun 1928.⁵

Suara Muhammadiyah sering disingkat menjadi SM. SM merupakan suatu lembaga pers yang dikelola oleh Muhammadiyah dan sudah diformat dalam bentuk majalah yang sekaligus berfungsi sebagai alat komunikasi dari Muhammadiyah yang bertugas menyampaikan komunikasi intern dan komunikasi ekstern kepada pihak luar (instansi pemerintah, partai-partai politik, organisasi massa dan sebagainya).⁶

³ *Ibid.*, hlm. 4.

⁴ Ichsan Wibowo Saputro, "Peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Muhammadiyah: Studi terhadap Surat Kabar Muhammadiyah pada tahun 1915-1945", *Skripsi* (Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, 2014), tidak dipublikasikan, hlm. 39.

⁵ Lihat *Suara Muhammadiyah*, 01/99, 1-15 Januari 2014, hlm. 6.

⁶ Lihat *Suara Muhammadiyah*, No. 1 & 2/46/Januari 1966, hlm. 23.

Pada masa transisi dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto yaitu pada tanggal 11 Maret 1966,⁷ kehidupan pers dibayangi pertarungan politik ideologi menuju transisi kehidupan pers yang lebih mengabdikan kepada kepentingan ekonomi. Menurut Jakob Oetama, pers mempunyai kaitan dengan masalah-masalah kekuasaan. Pers sebagai suatu institusi yang memiliki pengaruh dan memberikan efek tertentu kepada pembacanya, dan juga mampu mempengaruhi sikap politik pembacanya.⁸

Situasi politik dan ekonomi pada tahun 1960-an berada dalam titik yang paling kritis dalam sejarah. Hal itu diakibatkan oleh perebutan kekuasaan antara Presiden Soekarno, Angkatan Darat dan PKI yang justru mengabaikan masalah-masalah ekonomi. Selanjutnya muncullah Jenderal Soeharto yang mengklaim ingin memurnikan pelaksanaan UUD '45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada awal pemerintahannya, ia dihadapkan pada dua persoalan besar sebagai warisan sejarah pemerintahan Soekarno yaitu instabilitas politik dan lumpuhnya ekonomi negara dengan laju inflasi yang sangat tinggi.⁹ Melihat tantangan atas kedua persoalan tersebut maka sejak tahun 1968 presiden mencanangkan program pembangunan ekonomi yang

⁷ Menurut catatan sejarah awal pemerintahan Soeharto adalah sejak diteruskannya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 dari Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto. Supersemar merupakan pangkal sejarah naiknya Soeharto menjadi presiden RI yang kedua. Pada tanggal 9 Juni 1966 Supersemar dikukuhkan oleh MPRS menjadi ketetapan MPRS No IX/MPRS/1966. Bersamaan dengan itu Supersemar ditetapkan sebagai salah satu sumber hukum RI dalam Tap MPRS No XX/MPRS/1966 mengenai memorandum DPR-GR tentang sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI. Dengan demikian Supersemar dianggap sebagai landasan dan politik bagi keberadaan pemerintahan Soeharto. Lihat Muhammad Shokheh, *Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi: Relasi Islam- Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998* (Semarang: UNNES Press, 2008), hlm. 19.

⁸ Ignatius Haryanto, *Indonesia Raya Dibredel* (Yogyakarta: LKIS, 2006), hlm. 4-5.

⁹ *Ibid.*, hlm. 21.

berorientasi pertumbuhan.¹⁰ Pembangunan ekonomi tersebut dilandasi tiga prasyarat penting yaitu: stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Soeharto berprinsip bahwa pembangunan ekonomi memerlukan stabilitas keamanan, baik secara nasional maupun regional. Keamanan dalam negeri harus terjamin agar penanaman modal asing yang diperlukan tidak terganggu.¹¹

Studi ini sendiri ingin membicarakan salah satu pers Islam yaitu *Suara Muhammadiyah* sampai terjadinya peristiwa 15 Januari 1974 (Malapetaka 15 Januari 1974) yang menyebabkan banyak pers mendapatkan pembredelan dari pemerintah. Secara tidak langsung, pers dituduh pemerintah ikut bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Akan tetapi SM tidak mendapatkan pembredelan seperti yang terjadi pada pers-pers lain, bahkan majalah ini tetap eksis dan berkembang sampai sekarang. Hal ini dibuktikan dengan adanya sebuah pernyataan di dalam *Suara Muhammadiyah* No. 15 & 16 pada bulan Agustus tahun 1966, bahwa SM-lah satu-satunya penerbitan pers (majalah/sk) bukan saja di kalangan Muhammadiyah tetapi bahkan di seluruh penerbitan di Indonesia yang dapat terus terbit dengan nama yang sama, yaitu *Suara Muhammadiyah*. Ia satu-satunya majalah di Indonesia yang paling panjang usianya dan dapat mempertahankan hidupnya seperti panjangnya usia organisasi yang menerbitkannya yaitu Muhammadiyah. SM mulai terbit tahun

¹⁰*Ibid.*, hlm. 22.

¹¹ Asvi Warman Adam, *Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. xi.

1915 yang berarti ia terbit 3 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912.¹²

H. Mohammad Sakir mengemukakan bahwa selain majalah *Suara Muhammadiyah* dan majalah *Suara Aisyiyah* yang kini masih tetap eksis, setidaknya ada 25 buah majalah/bulletin milik Muhammadiyah atau yang dikelola oleh warga Muhammadiyah yang sudah pernah terbit. Arsip media tersebut dapat dijumpai di Perpustakaan Nasional RI, misalnya majalah *Al-Fatch* (1939-1942), *Annida* (1927-1928), *Arabic Monthly Paper* (1928), *Bahteramasa* (1936), *Berita* (1930), *Berita Tahunan Muhammadiyah Hindia Timour* (1929), *Brantas* (1936-1938), *Fadjar* (1960-1963), *Halal Bihalal* (1934), *Hoedaya* (1932), *Kemaoean Zaman* (1928), *Kentongan* (1941), *Madrasah Moehammadijah* (1939-1940), *Al-Mahdi* (1928-1930), *Menara Koedoes* (1925-1930), *Menara Ngampel* (1926), *Miratoel Moehammadijah* (1926-1927), *Moehammadi* (1929-1932), *Penerangan Islam* (1928), *Penjiar Islam* (1941), *Perikatan* (1933), *Poestaka Moehammadijah Dairah Banjoemas* (1929), *Suluh Pendidikan Moehammadijah* (1954-1955), *Tacawoeff Islam* (1929-1931), *Tjahaja* (1937-1938), dan *Batjaan Moerid* (1940-1941). Dari 25 majalah tersebut, hingga saat ini tidak ada yang terbit.¹³

Keadaan ekonomi akibat warisan dari pemerintahan sebelumnya yang begitu memprihatinkan, mendorong Presiden Soeharto melakukan tindakan represif baik terhadap pers, mahasiswa maupun kelompok masyarakat yang

¹² Lihat *Suara Muhammadiyah*, no. 15 & 16/46/Agustus 1966, hlm. 4.

¹³ Lembaga Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah: Almanak Muhammadiyah tahun 1997 M/1417-1418 H* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), hlm. 172-174.

mencoba melakukan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintah.¹⁴ Pembredelan surat kabar dan majalah tidak hanya berupa ancaman, tetapi juga menjadi kenyataan. Banyak surat kabar ataupun majalah yang mengalami hal tersebut. Media massa diarahkan menjadi corong penguasa atau memihak pada penguasa, maka surat kabar yang tidak mematuhi kebijakan tersebut akan mengalami pembredelan. Berkaitan dengan pers yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu *Suara Muhammadiyah* juga melakukan kritikan atau tanggapan terhadap kebijakan politik dan ekonomi yang diberlakukan oleh Presiden Soeharto. Akan tetapi majalah ini tidak mendapatkan pembredelan seperti pers yang lain. Karena sesuai dengan organisasi induknya yaitu Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah* bergerak dalam Da'wah Islam dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Uraian yang dijelaskan di atas menjadikan alasan penulis untuk meneliti *Suara Muhammadiyah* beserta responsnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi Presiden Soeharto yang berlangsung dari tahun 1966 sampai dengan 1974.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Pers yang dikaji dalam penelitian ini adalah *Suara Muhammadiyah*, yaitu majalah atau pers Islam yang dikelola oleh Muhammadiyah yang masih tetap eksis dari mulai terbit tahun 1915 sampai sekarang. Pokok masalah yang dikaji adalah respons-respons *Suara Muhammadiyah* yang kemungkinan menyebabkan bertahannya majalah ini dan tidak mengalami pembredelan seperti pers-pers lain yang mengalami hal tersebut. Kebijakan Soeharto yang

¹⁴ Asvi Warman Adam, *Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2006), hlm. xi.

dikaji dalam penelitian ini adalah kebijakan ekonomi yang diberlakukan Soeharto dalam rentang waktu 1966-1974. Kritikan-kritikan pers pada rentang waktu itu dianggap menghambat pembangunan ekonomi karena stabilitas keamanan menjadi terganggu.

Batas tahun yang diteliti yaitu antara tahun 1966 sampai dengan 1974. Dipilih tahun 1966 karena pada tahun ini merupakan terjadinya masa transisi pemerintahan dari Soekarno ke tangan Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Pada periode ini, sikap dan perlakuan penguasa terhadap pers non/anti komunis sebagai *partner of power*-nya untuk “mengganyang” PKI dan simpatisan-simpatisannya dan kemudian untuk meruntuhkan kekuasaan Soekarno. Muchtar Lubis menyebut bentuk hubungan pers dengan penguasa pada tahun-tahun pertama Soeharto berkuasa dengan istilah “bulan madu”.¹⁵ Hal ini dilakukan Soeharto agar pers menjaga keamanan nasional dari ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri untuk bertindak dengan kesadaran sebagai pengawal Pancasila, lima prinsip-prinsip ideologis bangsa.¹⁶

Penelitian ini dibatasi sampai tahun 1974 karena tertuju pada peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974). Peristiwa ini dipicu oleh semakin meningkatnya protes-protes mahasiswa, pers pun semakin mempertajam kritik-kritiknya terhadap pemerintah dan kebijakan-kebijakan politik yang diambilnya. Hal ini tentu saja menimbulkan reaksi yang semakin keras dari penguasa yaitu dengan dilakukannya pembredelan secara massal oleh

¹⁵Akmad Zaini Abar, *1966-1974: Kisah Pers Indonesia* (Yogyakarta: LKIS, 1995), hlm. 65.

¹⁶ David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru*, terjemah oleh Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011), hlm. 6.

pemerintah, terutama terhadap pers yang dianggap sangat kritis terhadap penguasa.¹⁷ Agar lebih sistematis, maka penelitian ini dipandu dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja kebijakan-kebijakan yang diberlakukan oleh Soeharto untuk memulihkan stabilitas ekonomi negara?
2. Bagaimana perkembangan *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966-1974?
3. Bagaimana respons *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Soeharto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan perkembangan *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966-1974.
2. Mengetahui kebijakan ekonomi Presiden Soeharto dalam memulihkan kembali stabilitas ekonomi yang sempat terpuruk akibat warisan dari pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden Soekarno.
3. Memahami respons-respons yang terdapat di dalam *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Presiden Soeharto.

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Bahan pelengkap informasi tentang sejarah Pers Islam di Indonesia pada umumnya dan sejarah *Suara Muhammadiyah* pada khususnya.
2. Menumbuhkan pemahaman mengenai pemikiran-pemikiran ekonomi Muhammadiyah yang terdapat di dalam *Suara Muhammadiyah*.

¹⁷ Zaini Abar, *1966-1974: Kisah Pers Indonesia*, hlm.73.

D. Tinjauan Pustaka

Berbicara mengenai perkembangan *Suara Muhammadiyah* di Indonesia, bukan merupakan hal yang baru dalam sejarah. Majalah *Suara Muhammadiyah* ini terbit setiap 2 minggu sekali dan telah menjadi media resmi dari Muhammadiyah untuk mensosialisasikan ide dan gagasan yang diemban oleh Muhammadiyah. Dalam tulisan ini digunakan dokumen dan bukti sejarah dalam mengkaji respons majalah *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan ekonomi Presiden Soeharto tahun 1966-1974.

Keberadaan hasil penelitian tersebut diposisikan sebagai kajian pustaka serta referensi untuk penelitian ini. Penelitian ini difokuskan pada Majalah *Suara Muhammadiyah* antara tahun 1966-1974 yang bertujuan untuk melengkapi atau sebagai pelengkap penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu digunakan beberapa penelitian sebagai pembandingan penelitian yang dilakukan, di antaranya adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan Ichsan Wibowo Saputro dalam skripsinya yang berjudul “Peran Pers Persyarikatan Muhammadiyah dalam Pelaksanaan Pendidikan Agama Bagi Warga Muhammadiyah (Studi terhadap Surat Kabar *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1915-1954)”, 2014, Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam bagi warga Muhammadiyah pada tahun 1915-1945 dan telah menempati posisi sebagai salah satu unsur yang penting dalam Pendidikan Agama Islam bagi masyarakat. Pola Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan oleh surat kabar *Suara*

Muhammadiyah pada tahun 1915-1945 tercatat sangat beragam pada rentang tahun 1921-1925 yaitu dalam bentuk *voorstel* maupun tanya jawab. Jawaban atas pertanyaan maupun perbedaan pendapat di kalangan warga Muhammadiyah pada tahun-tahun setelahnya biasanya dibukukan dalam bentuk kitab yang terlebih dahulu telah disidangkan oleh Majelis Tarjih.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Nailufar dalam skripsinya yang berjudul “Studi Tentang Materi dan Metode Dakwah Majalah *Suara Muhammadiyah* Yogyakarta (Analisis Isi Rubrik Hikmah Periode 2004)”, 2005, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang materi atau pesan dakwah yang disampaikan dalam rubrik hikmah majalah *Suara Muhammadiyah* yang mengarah pada materi akhlak dengan pokok bahasan tentang akhlak diri sendiri. Metode dakwah yang dipakai dalam rubrik hikmah majalah *Suara Muhammadiyah* adalah metode hikmah dan mau’izhah hasanah. Adapun metode yang tidak dipakai adalah metode mujadalah.

Ketiga, Agus Purnomo dalam skripsinya yang berjudul “Analisis Isi pada Kolom Khotbah Jum’at di Majalah *Suara Muhammadiyah* (edisi Juli 2002-Juni 1003)”, 2004, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang teks khutbah Jum’at yang mengandung pesan dakwah berjenis akhlak yang paling banyak muncul dari pada pesan berjenis aqidah dan syari’ah.

Keempat, Haidir Fitra Siagan dalam skripsinya yang berjudul “Tanggapan Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan Terhadap Majalah *Suara*

Muhammadiyah”, 1999, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. Skripsi ini menjelaskan bagaimana tanggapan para Pimpinan Muhammadiyah mulai tingkat daerah dan tingkat wilayah yang ada di Sulawesi Selatan terhadap majalah resmi organisasinya yakni *Suara Muhammadiyah*. Hal itu bertujuan untuk mengetahui penilaian pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan terhadap perwajahan, isi rubrik, kualitas kertas, pelaksanaan fungsi majalah *Suara Muhammadiyah* serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pimpinan Muhammadiyah untuk membaca majalah *Suara Muhammadiyah*.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, penulis belum menemukan pembahasan tentang tanggapan atau respons *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan ekonomi Presiden Soeharto pada tahun 1966-1974. Penelitian-penelitian tersebut memberikan gambaran umum mengenai sejarah berdirinya *Suara Muhammadiyah*, materi-materi tentang keislaman di dalam *Suara Muhammadiyah* serta penilaian pimpinan Muhammadiyah terhadap perwajahan, isi rubrik, kualitas kertas dan pelaksanaan fungsi *Suara Muhammadiyah*. Oleh karena itu, dalam studi ini peneliti mencari pembahasan yang baru untuk melengkapi dan menjawab permasalahan yang dirumuskan di atas. Setelah mengetahui deskripsi tentang karya-karya di atas, terkait dengan penelitian mengenai *Suara Muhammadiyah* maka dapat diketahui bahwa tulisan ini merupakan pelengkap dari karya-karya sebelumnya.

E. Landasan Teori

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah yang bermaksud merekonstruksi sejarah masa lampau secara kronologis dan sistematis. Penelitian ini mengangkat sejarah pers Islam sebagai objek kajian, dengan fokus kajian respons Majalah *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan ekonomi Presiden Soeharto tahun 1966-1974 M.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisa isi yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengamati dan mengukur isi komunikasi dan sering digunakan untuk mengkaji pesan-pesan media. Dengan demikian pendekatan ini mengkaji isi secara kuantitatif yang mengandung asumsi bahwa frekuensi kejadian dari berbagai sifat isi itu sendiri dan merupakan faktor penting dalam proses komunikasi dalam keadaan-keadaan tertentu.¹⁸ Berdasarkan pendekatan tersebut, maka penelitian ini didukung oleh beberapa konsep. Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Majalah *Suara Muhammadiyah*

Majalah merupakan salah satu media informasi tulisan yang berbentuk buku dan berisi berbagai macam liputan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto atau folio. Majalah biasanya terbit teratur baik seminggu sekali, dua minggu sekali, dan satu bulan sekali.¹⁹ Perbedaan majalah dengan media cetak lainnya adalah pertama, majalah umumnya memiliki sampul, sementara koran tidak

¹⁸ Don Michael Flournoy, *Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*, terjemah oleh Drs. Akhmadsyah Naina (Yogyakarta: UGM Press, 1989), hlm. 12.

¹⁹ Yosai Iriantara, *Manajemen Media Massa* (Banten: Universitas Terbuka, 2014), hlm. 6.15.

memiliki sampul. Sampul majalah pada umumnya dicetak di atas kertas yang lebih tebal dibandingkan kertas yang dipakai untuk isi majalah. Kedua, majalah disajikan dalam tata warna dan dengan menggunakan kertas yang umumnya lebih baik mutu dan jenisnya dari kertas koran.²⁰

Suara Muhammadiyah sudah diformat dalam bentuk majalah. Majalah ini merupakan organ²¹ resmi dalam Muhammadiyah. Kemodernan organisasi Muhammadiyah yang terinspirasi dari organisasi Nasrani modern yang dibawa oleh bangsa-bangsa lain telah memberikan efek modernisasi pula kepada *Suara Muhammadiyah*. Sebagai organisasi pers milik Muhammadiyah, diharapkan dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi maupun budaya dapat diwarnai oleh ajaran dan nilai-nilai Ilahiyah dan dapat meningkatkan kualitas manusia pada tingkatan *ahsani taqwim* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an.²²

Pada umumnya orang menganggap bahwa media massa cetak seperti surat kabar dan majalah itu adalah pers. Oleh karena itu kita perlu mengetahui pengertian pers itu sendiri. Menurut Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat kata “pers” berasal dari bahasa Belanda yang artinya menekan atau pengepres, yang dalam bahasa Inggris berarti *Press* yang juga berarti menekan atau mengepres. Jadi secara harfiah kata *pers* atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Kata *pers* atau *press* juga digunakan untuk

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6. 16.

²¹ *Organ* merupakan alat perkumpulam seperti majalah dan surat kabar untuk menyampaikan suara partai, organisasi dan sebagainya. Lihat *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 967.

²² Lihat *Suara Muhammadiyah*, no. 24/75/Desember 1990, hlm. 4.

merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan penghimpunan berita, baik oleh wartawan media cetak maupun oleh wartawan media elektronik.²³ Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian yakni pers dalam pengertian sempit dan pers dalam pengertian luas. Pers dalam arti sempit, hanya terbatas pada media cetak, yakni surat kabar, majalah, dan bulletin kantor berita. Pers dalam arti luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran, dan televisi siaran.²⁴

Menurut Drs. F. Rachmadi pers merupakan bagian (subsistem) dari sistem yang lebih besar yaitu sistem komunikasi. Sedangkan sistem komunikasi merupakan bagian dari sistem kemasyarakatan. Pers, sebagai subsistem komunikasi menduduki posisi dalam masyarakat sebagai jembatan komunikasi timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat serta masyarakat dengan masyarakat.²⁵

Pengertian pers di Indonesia juga telah tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 1966:

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan, alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa, yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya.”²⁶

²³ Edy Susanto, dkk., *Hukum Pers di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 19-21.

²⁴ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984), hlm. 145.

²⁵ Atmadi, *Bunga Rampai Sistem Pers Indonesia* (Jakarta: PT. Pantja Simpati, 1985), hlm. 353-354.

²⁶ Uchjana, *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*, hlm. 148.

Definisi pers tersebut menunjukkan bahwa pers di Indonesia merupakan lembaga kemasyarakatan (*social institution*), bukan lembaga pemerintah dan bukan terompet pemerintah. Pers Indonesia harus mempunyai idealisme yang jelas, yaitu alat perjuangan nasional, bukan sekedar penjual berita untuk mencari keuntungan finansial. Pers Indonesia baik yang terbit di ibu kota negara maupun yang terbit di ibu kota daerah tingkat I maupun daerah tingkat II, semuanya merasakan diri sebagai pers nasional.

Dalam masyarakat Indonesia, pers mempunyai posisi khusus yaitu sebagai subsistem komunikasi. Ia menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat atau antar masyarakat. Oleh karena itu pers mempunyai fungsi sebagai pemberi informasi, alat pendidikan, sarana kontrol sosial maupun sarana perjuangan bangsa untuk mendorong lahirnya kesadaran nasional.

Idealisme yang melekat pada pers dijabarkan dalam pelaksanaan fungsinya, selain menyiarkan informasi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi. Fungsi-fungsi tersebut yaitu:²⁷

a. Fungsi menyiarkan informasi (*to inform*)

Fungsi ini memberikan kepada khalayak pembaca surat kabar dan majalah yang memerlukan informasi mengenai berbagai hal yaitu peristiwa yang terjadi, gagasan atau pikiran orang lain, apa yang dilakukan oleh orang lain dan apa yang dikatakan orang lain.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 149-150.

b. Fungsi mendidik (*to educate*)

Fungsi ini bermaksud sebagai sarana pendidikan massa, majalah dan surat kabar memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga khalayak pembaca bertambah pengetahuannya. Tulisan-tulisan tersebut secara implisit bisa dalam bentuk artikel atau tajuk rencana, cerita bersambung atau berita bergambar.

c. Fungsi menghibur (*to entertain*)

Isi surat kabar dan majalah yang bersifat hiburan bisa berbentuk cerita pendek, cerita bersambung, cerita bergambar, teka-teki silang, pojok, karikatur, kadang juga berita yang mengandung minat insani (*human interest*). Hal ini bertujuan untuk melemaskan ketegangan pikiran setelah para pembaca dihidangi berita dan artikel yang berat.

d. Fungsi mempengaruhi (*to influence*)

Fungsi inilah yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Fungsi ini secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel.

Pengalaman pahit selama 2 dekade (1945-1965), telah menimbulkan trauma yang mendalam, sehingga mendorong usaha yang keras untuk melahirkan suatu sistem baru yang sesuai dengan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang politik, ekonomi maupun dalam bidang pers. Pada tanggal 12 Desember 1966 Presiden bersama dengan DPR berhasil mewujudkan janji konstitusional Pasal 28 UUD 1945 dengan disahkannya Undang-Undang no. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pers (disingkat Undang-Undang Pers, 1966) yang kemudian menjadi dasar Sistem Pers Pancasila.

Anwar Arifin, dalam bukunya yang berjudul *Sistem Komunikasi Indonesia* menyatakan bahwa:

“Berdasarkan sistem tersebut, pers Indonesia dikembangkan dalam kerangka konseptual yang disebut pers bebas dan bertanggung jawab. Hal itu berarti kebebasan pers Indonesia dibatasi oleh tanggungjawab, terutama dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewajiban yang digariskan baik dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) maupun dalam undang-undang pers. Meskipun demikian pers Indonesia tetap memiliki hak kontrol, kritik, dan koreksi yang bersifat konstruktif. Dalam Undang-Undang Pers dijelaskan pula bahwa pers Indonesia tidak dikenakan sensor dan pembredelan serta keperluan Surat Izin Terbit (SIT), tetapi hal ini hanya berlaku dalam masa peralihan.”²⁸

Dalam Undang-Undang Pers (Pasal 11), dijelaskan bahwa penerbitan pers yang bertentangan dengan Pancasila seperti halnya yang bertolak dari paham komunisme/Marxisme-Leninisme dilarang. Demikian pula dalam Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/1966 Pasal 2 ayat 2 tercantum bahwa kebebasan Pers Indonesia adalah kebebasan untuk menyatakan kebenaran dan keadilan, dan bukan kebebasan dalam arti liberalisme.

Dalam ketetapan MPRS No. XXXII/1966 tersebut ditegaskan (Pasal 2 ayat 1) bahwa kebebasan pers berhubungan erat dengan keharusan adanya pertanggungjawaban kepada: (a) Tuhan Yang Maha Esa; (b) Kepentingan rakyat; (c) Kelangsungan dan penyelesaian revolusi; (d) moral dan tata susila; (e) kepribadian bangsa. Adapun dalam Undang-Undang No. 11/1966 dirumuskan 5 ayat bahwa kebebasan pers sebagai hak asasi warga negara

²⁸ Anwar Arifin, *Sistem Komunikasi Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011), hlm. 135.

dijamin (ayat 1) dan kebebasan pers itu didasarkan atas tanggungjawab nasional, dan pelaksanaan kewajiban dan hak pers (ayat 2).²⁹

Prinsip dasar dari Pers Pancasila menganut prinsip bebas dan bertanggungjawab. Hal itu telah menjadi dasar pemikiran dari para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 sejak masa pergerakan dan dapat disimak dari diskusi yang melatabelakangi lahirnya pasal 28 UUD 1945 (Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dengan undang-undang). Pasal itu menyangkut hak asasi warga negara yang harus dijamin dalam suatu negara demokrasi.

Dalam kaitannya dengan Pers Pancasila yang telah dijelaskan di atas, *Suara Muhammadiyah* mempunyai pijakan dalam pelaksanaan penerbitannya dan sesuai dengan paham yang dianut Muhammadiyah, yakni:³⁰

- a. Pijakan ideal: *Suara Muhammadiyah* merupakan media massa Islam yang menaruh komitmen terhadap nilai-nilai dan ajaran-ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b. Pijakan konstitusional: *Suara Muhammadiyah* merupakan media massa yang dalam memperjuangkan nilai-nilai dan ajaran-ajaran keislaman tunduk pada pedoman-pedoman dasar bermuhammadiyah (AD, ART,

²⁹ *Ibid.*, hlm. 136.

³⁰ Lembaga Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah: Almanak Muhammadiyah tahun 1997 M/1417-1418 H*, hlm. 103.

MKCH, Kepribadian Muhammadiyah, Keputusan Mu'tamar dan Tanwir).

- c. Pijakan Operasional: *Suara Muhammadiyah* merupakan media massa yang melandaskan operasionalisasi dirinya pada dakwah amar ma'ruf nahi munkar (fungsi edukasi, fungsi partisipasi, fungsi kontrol dan fungsi informasi).
- d. Pijakan profesional: *Suara Muhammadiyah* merupakan media massa milik Muhammadiyah yang dalam jabatan operasionalisasi tidak mengabaikan kaidah-kaidah jurnalisme dan perundang-undangan pers yang berlaku.

3. Kebijakan

Kebijakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kebijakan politik dan ekonomi. Sebelum itu, kita perlu memahami tentang pengertian kebijakan itu sendiri agar kita dapat menjaga kejelasan pemikiran kita dalam pembahasan selanjutnya.

Kebijakan adalah salah satu konsep dalam ilmu politik.³¹ Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan.³²

Sementara itu, ilmu ekonomi adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdaya upaya untuk memberikan pengetahuan dan

³¹ Miriam Budiarjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2009), hal. 2.

³² *Ibid.*, hal. 20.

pengertian tentang gejala-gejala masyarakat yang timbul karena perbuatan manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan atau untuk mencapai kemakmuran.³³ Di dalam beberapa buku telah disebutkan bahwa ilmu ekonomi termasuk dalam kajian ilmu sosial, sedangkan ilmu sosial merupakan ilmu tentang manusia serta masyarakat yang sekelompok manusia hidup di dalamnya. Dengan demikian subjek ilmu ekonomi adalah manusia itu sendiri dan badan-badan yang terlibat dalam kegiatan perekonomian. Adapun objek-objek ilmu ekonomi adalah cara-cara serta tindakan-tindakan yang ditempuh oleh manusia di dalam mengalokasikan sumber-sumber yang ada.³⁴

Setiap individu dan masyarakat terdapat kegiatan ekonomi yang berupaya untuk mendapatkan sumber-sumber guna memenuhi kebutuhan sehingga dapat hidup secara layak sebagai manusia.³⁵ Berdasarkan asumsi sumber-sumber yang tersedia dalam masyarakat sangat terbatas, maka kegiatan ekonomi tersebut merupakan kegiatan membuat pilihan di antara berbagai alternatif cara untuk mendayagunakan sumber-sumber yang terbatas tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut masyarakat-negara mengembangkan sistem ekonomi³⁶ yang berbeda-beda.

³³ Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 8.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

³⁵ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: P. T Grasindo, 2010), hlm. 263.

³⁶ Sistem ekonomi adalah seperangkat mekanisme dan lembaga untuk membuat dan melaksanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu wilayah tertentu. Sistem ekonomi terdiri atas sejumlah mekanisme, pengaturan organisasi, dan peraturan untuk membuat dan melaksanakan keputusan tentang alokasi sumber-sumber yang terbatas. Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, hlm. 264-265.

Penelitian ini berdasarkan asumsi bahwa antara politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Hal itu disebabkan karena kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik yaitu mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat. Selain itu kebijakan ekonomi juga merupakan masalah politik karena ia mencerminkan keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah dalam konteks kelembagaan.³⁷ Ekonomi (yang menyangkut fenomena kekayaan) dan politik (yang berurusan dengan kekuasaan) diikat oleh hubungan saling mempengaruhi. Di satu pihak, politik umumnya menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya ke arah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Artinya penerapan kekuasaan dengan segala bentuknya merupakan faktor penting yang menentukan sifat suatu sistem ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri lebih meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Artinya proses itu bisa mengubah hubungan kekuasaan antar kelompok.³⁸

Untuk memahami proses penciptaan dan redistribusi kekayaan dan kekuasaan itu, analisa ekonomi-politik menekankan asumsi bahwa karena kelangkaan sumber daya, tidak ada kebijaksanaan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Pasti ada pihak yang diuntungkan dan yang dirugikan oleh suatu kebijaksanaan pemerintah.³⁹

³⁷ *Ibid.*, hlm. 278.

³⁸ Mohtar Mas'ood, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. xvi.

³⁹ *Ibid.*, hlm. xvii.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karena itu penelitian perlu adanya metode penelitian sejarah yang lazim disebut sebagai metode sejarah. Metode merupakan cara, jalan, atau petunjuk teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan metode sejarah adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Adapun pengertian yang lebih khusus mengenai metode penelitian sejarah adalah seperangkat aturan dan prinsip sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan mengajukan sintesa dari hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.⁴⁰ Langkah yang ditempuh dalam penelitian sejarah adalah dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah mempunyai empat langkah antara lain:

1. Heuristik

Yaitu mengumpulkan sumber-sumber (*sources*) atau bukti-bukti (*evidences*) sejarah.⁴¹ Sumber-sumber penelitian yang digunakan ada dua macam yaitu:

a. Sumber Tertulis

Sumber tertulis digunakan untuk melihat realitas dan dinamika orientasi pers Muhammadiyah, maka akan menggunakan majalah *Suara Muhammadiyah* yang dicari melalui Kantor Penerbitan Suara Muhammadiyah di Yogyakarta. Sumber-sumber penelitian untuk studi

⁴⁰ Dudung Abdurahman, *Metode Penelitian Sejarah Islam* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 103.

⁴¹ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 51.

pustaka sejarah politik ekonomi Soeharto ini berupa karya-karya hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para sarjana Indonesia maupun sarjana luar negeri tentang sejarah politik Indonesia, terutama sejarah politik Soeharto. Sumber-sumber penelitian studi pustaka tersebut dicari melalui Perpustakaan Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Pusat Studi Muhammadiyah, dan Kantor Penerbitan Suara Muhammadiyah.

b. Sumber Lisan

Teknik pengumpulan sumber lisan yaitu wawancara atau interview. Wawancara atau interview adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih dengan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara bertujuan untuk mengumpulkan informasi, bukan untuk merubah atau mempengaruhi pendapat responden.⁴² Wawancara dengan saksi atau pelaku sejarah dilakukan untuk melengkapi data yang belum tersedia atau belum ditemukan saat penelitian ini dilakukan. Dengan demikian wawancara itu sebagai bahan penjas atas kesamaran data atau apa yang diamati oleh peneliti dirasa belum lengkap.⁴³ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai sumber yang hidup pada masa itu sekaligus sebagai pengelola redaksi *Suara Muhammadiyah* yang bernama Imron Nasri dan Musthafa W. Hasyim.

2. Verifikasi atau Kritik

⁴² Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 83.

⁴³ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 107.

Langkah selanjutnya dengan menganalisis data dengan mencari bagian-bagian yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas atau melakukan kritik untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam hal ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber (*otentisitas*) dengan melalui 2 tahap, yaitu meliputi kritik ekstern dan intern. Kritik ekstern dilakukan dengan mencari keaslian sumber dengan menguji bagian-bagian fisik meliputi kertas, gaya tulisan, ejaan yang berlaku pada waktu itu, bahasa dan ungkapan. Untuk menguji isinya dilakukan kritik intern dengan cara menelaah isi tulisan dan membandingkannya dengan tulisan yang lain agar mendapatkan data yang kredibel dan akurat.⁴⁴

3. *Interpretasi*

Langkah selanjutnya setelah melakukan kritik sumber adalah melakukan penafsiran, dalam tahap ini peneliti melakukan penafsiran terhadap sumber data yang diperoleh guna mengembangkan tulisan lebih rinci dan mudah dipahami artinya memberi makna kepada data-data atau bukti-bukti sejarah.⁴⁵ Data yang didapat kemudian dikembangkan dengan cara menganalisis dan mengintesis. Analisis berarti menguraikan sumber-sumber yang didapat, sedangkan sintesis berarti menyatukan melalui konsep dan teori.⁴⁶

4. *Historiografi*

Tahap ini merupakan tahap akhir dari langkah yang ditempuh yaitu berupa penulisan. Historiografi adalah menyampaikan sintesis yang

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

⁴⁵ Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, hlm. 81.

⁴⁶ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, hlm. 114.

didapatkan dalam bentuk kisah. Setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi dan analisis dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa. Tahap ini menyajikan atas semua fakta yang didapat yang akan disampaikan dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan standar yang ditentukan.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah serangkaian pembahasan yang termuat dan tercakup dalam skripsi ini, dimana antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan sebagai satu kesatuan yang utuh. Untuk mendapat gambaran yang sistematis terhadap penulisan ini, maka peneliti menyusun sistematika pembahasan yang berguna untuk menggambarkan secara keseluruhan isi dan maksud dari penelitian yang dikaji. Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasan ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan gambaran umum dari pembahasan ini, diawali dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini menguraikan hal-hal pokok dan menjadi dasar serta landasan bagi bab-bab selanjutnya. Bab ini juga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merupakan kerangka awal dalam penelitian sehingga mengarahkan pembaca pada substansi penelitian.

⁴⁷ Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2007), hlm. 156.

Bab kedua mendeskripsikan tentang kebijakan ekonomi yang diberlakukan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1966-1974. Uraian ini menyangkut stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi, kebijakan pembangunan, kebijakan harga dan pangan. Uraian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kebijakan ekonomi sekaligus memberikan gambaran umum mengenai kondisi ekonomi di Indonesia sebagai pendukung perkembangan yayasan penerbitan pers *Suara Muhammadiyah*.

Bab ketiga membahas tentang perkembangan *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966-1974. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui sejarah lahirnya Penerbitan Pers Majalah struktur, manajemen, berita tentang perekonomian Indonesia dan pemberitaan pada *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966-1974. Selain itu bab ini memberikan gambaran mengenai Muhammadiyah secara umum, karena pada dasarnya pemikiran yang tertulis dalam majalah ini tidak terlepas dari pemikiran Muhammadiyah itu sendiri.

Bab keempat membahas mengenai respons *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan ekonomi Presiden Soeharto yang berisi analisis artikel-artikel di dalam *Suara Muhammadiyah*. Pembahasan dalam bab ini bertujuan untuk mengetahui respons-respons yang berbentuk penolakan, dukungan maupun kritikan terhadap pemerintah.

Bab kelima merupakan bab penutup dari penelitian ini yang mengutarakan tentang kesimpulan hasil penelitian yang berupa jawaban dari rumusan-rumusan masalah tentang penelitian ini, saran-saran yang merupakan

rangkaian inti dalam penelitian ini, serta dilengkapi juga dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan biografi penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Presiden Soeharto merancang kebijakan ekonomi dengan menghubungkan antara penciptaan strategi ekonomi dengan pembentukan suatu sistem politik yang mendukung kebijaksanaan ekonomi. Keamanan dalam negara harus terjamin dengan menumbuhkan stabilisasi dan keamanan negara untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang berorientasi pertumbuhan. Oleh karena itu Jendral Soeharto menggunakan berbagai mekanisme yang telah ada dalam UUD 1945 dengan menafsirkan kembali kerangka konstitusi yang telah ada. Ia berusaha menciptakan serangkaian struktur dan praktek politik yang dapat memberikan dukungan bagi perubahan ekonomi serta mampu mengendalikan akibat-akibatnya terutama menjinakkan oposisi (penentang) dan mencegah mereka agar tidak mengganggu program ekonomi pemerintah. Cara tersebut dimaksudkan untuk membangun suatu kehidupan politik yang bebas dari konflik ideologi.

Perkembangan *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966 sudah memasuki fase baru sejak tanggal 15 Juli 1965 yang ditandai dengan dikeluarkannya SIT Deppen No. 19/SK/DPHM/SIT/1965 tertanggal 2 September 1965, nomor perdananya diedarkan dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-36 pada tanggal 9-15 Juli 1965 di Bandung. Pada tahun inilah *Suara Muhammadiyah* diberi istilah “SM Wajah dan Gaya Baru” (WGB) yang berjalan kurang lebih 23 tahun. “SM Wajah dan Gaya Baru” (WGB) diamanatkan kepada Prof. KH.

Faried Ma'ruf yang langsung menjabat sebagai pemimpin umum dan sekaligus sebagai pemimpin redaksi. *Suara Muhammadiyah* WGB itu diharapkan dapat menjadi majalah yang berbobot dan bermutu dalam segala hal, sehingga lebih digemari oleh warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum. Jadi majalah ini diharapkan lebih berkembang menyertai perkembangan majalah lainnya dengan tetap memelihara ciri ke-Muhammadiyah dan ke-Islaman

Adapun respons di dalam *Suara Muhammadiyah* terhadap kebijakan ekonomi Presiden Soeharto di antaranya adalah *pertama*, respons berupa penolakan yang didasarkan atas pembelaan kepada kebenaran dan keadilan, serta didasarkan atas ajaran dan tuntunan Islam. *Kedua*, respons yang mengandung dukungan terhadap pemerintah disesuaikan dengan enam prinsip landasan segala gerak dan amal usaha Muhammadiyah. *Ketiga*, respons berupa kritikan terhadap pemerintah. Respons ini bermaksud sebagai kritikan yang baik dan bermanfaat serta membangun, atau kritikan yang bertujuan ingin membantu untuk mencapai suasana yang dapat menggugah semangat atau rasa tanggung jawab yang lebih mendalam.

B. Saran

1. Penelitian selanjutnya mengenai majalah *Suara Muhammadiyah* hendaknya dapat menjangkau seluruh sumber utama yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat menampilkan data secara komprehensif.
2. Penelitian selanjutnya mengenai majalah *Suara Muhammadiyah* hendaknya dapat mengkorelasikan berita yang didapatkan dari majalah sejawan. Upaya ini dilakukan untuk dapat menggambarkan secara utuh kondisi

sosial masyarakat saat itu dilihat dari berbagai sudut pandang/kacamata surat kabar sejaman, sehingga data dapat dipaparkan secara lebih baik.

3. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mendapatkan pemaparan fakta sejarah dari para pelaku sejarah.

Setelah meneliti dan menganalisa data mengenai Yayasan Penerbitan Pers majalah *Suara Muhammadiyah*, maka penulis memberikan beberapa saran demi kemajuan Yayasan Penerbitan Pers majalah ini sebagai berikut:

1. Perlunya menjaga arsip-arsip penting, seperti struktur organisasi redaksi agar penulisan sejarah mengenai *Suara Muhammadiyah* dapat dituliskan sesuai dengan fakta sejarah.
2. Perlunya peningkatan mutu dan kualitas pada staf redaksi misalnya melakukan training jurnalistik dengan melibatkan praktisi serta akademisi di bidang jurnalistik dan media.
3. Agar proses pengolahan berita lebih maksimal, redaksi majalah *Suara Muhammadiyah* hendaknya mencari sumber daya manusia yang berkualitas, mengerti tentang jurnalistik dan berkompeten dalam bidangnya.

Dalam mengatasi krisis ekonomi tidak hanya mengadakan perbaikan – tambal sulam- terhadap Penpers saja tetapi harus didasari pemikiran serta model baru yang dapat memberikan pegangan dan perspektif baru bagi masyarakat. Krisis kepercayaan dari rakyat berupa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa perlu mendapatkan penyelesaian agar tidak berkembang menjadi krisis politik.

Kebijakan pembangunan yang diciptakan oleh Presiden Soeharto hendaknya bersifat *nation-wide*, tidak hanya Jawa *centris* atau Jakarta *centris*. Daerah-daerahlah yang merupakan sumber bahan-bahan mentah dan sumber devisa. Strategi dasar pembangunan yang berlandaskan produksi pertanian, maka desa senantiasa dikaitkan dengan pengertian tani dan tata-hidup yang berkaitan dengan adat, kepercayaan dan peredaran musim. Produksi pangan dan ekspor sebagian besar adalah hasil dari tani dan desa.

Rencana Pembangunan Lima Tahun yang pelaksanaannya tertuang dalam anggaran belanja rutin dan pembangunan negara, mengandung investasi yang besarnya diperkirakan baru meliputi sebagian kebutuhan investasi total yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan tiap jiwa. Untuk menutup kekurangan itu dengan cara membangkitkan swadaya masyarakat terutama swadaya desa dan tani yang merupakan bagian terbesar dan sempurna dari seluruh bangsa kita. Modal asing bersifat pelengkap yang juga penting. Dalam hubungan ini politik harga pemerintah mengenai beras yang dihasilkan oleh petani perlu mendapatkan penilaian kembali secara mendalam, dan perlu dicapai suatu harga yang tidak terlalu merugikan kedua belah pihak dan hendaknya ditentukan melalui musyawarah. Selain itu hendaknya ditumbuhkan rasa saling membutuhkan dan saling mengisi antar daerah terutama dalam arti ekonomis. Asas komplementarita ini merupakan sendi terkuat dari kesatuan dan persatuan Indonesia. Dalam penelitian ini masih banyak kesempatan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk mengembangkan dan menyempurnakan penelitian yang penulis lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Skripsi:

- Ahmad Subandi. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Akmad Zaini Abar. *1966-1974: Kisah Pers Indonesia*. Yogyakarta: LKIS, 1995.
- Anne Booth & Peter Mc Cawley. *Ekonomi Orde Baru*, terj. oleh Boediono. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Anwar Arifin. *Sistem Komunikasi Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2011.
- Aprini Erlina. “Sejarah Pertumbuhan Pers Islam Indonesia: Studi Kasus Panji Masyarakat Pada Masa Kepemimpinan Prof. Dr. Hamka (1959-1981)”, Skripsi Jurusan Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2006. tidak dipublikasikan.
- Arndt. *Pembangunan Ekonomi Indonesia: Pandangan Seorang Tetangga*, terj. oleh Ari Basuki Budiawan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991.
- Asvi Warman Adam. *Soeharto: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak, 2006.
- Atmadi. *Bunga Rampai Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: PT. Pantja Simpati, 1985.
- Bimo Walgito. *Psikologi Sosial: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Andi Offset, 1978.
- Cholid Narbuko. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2012.
- David T. Hill. *Pers di Masa Orde Baru*, terjemah oleh Gita Widya Laksmi Soerjoatmodjo. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2011.
- Deddy Mulyana. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Dera Mugni Labib Alluqoni. “Respon Mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syahid Jakarta Terhadap Rubrik Tajuk Rencana Republika”, Skripsi Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Ilmu

Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2011. tidak dipublikasikan.

Don Michael Flournoy. *Analisa Isi Surat Kabar-Surat Kabar Indonesia*, terjemah oleh Drs. Akhmadsyah Naina. Yogyakarta: UGM Press, 1989.

Dudung Abdurahman. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak, 2011.

Edy Susanto, dkk., *Hukum Pers di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Eni Martaningrum. "Politik Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Soeharto Tahun 1969-1989 Perspektif Fikih Siyasah", Skripsi Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2013. tidak dipublikasikan.

Haidir Fitra Siagan. "Tanggapan Pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan terhadap Majalah Suara Muhammadiyah", Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Ujung Pandang. 1999. tidak dipublikasikan.

Helius Sjamsuddin. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2007.

Herudjati Purwoko. *Muatan Budaya, Sosial dan Politik dalam Bahasa dan Komunikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Ichsan Wibowo Saputro. "Peran Persyarikatan Muhammadiyah dalam Melaksanakan Pendidikan Agama Islam bagi Warga Muhammadiyah: Studi terhadap Surat Kabar Muhammadiyah pada tahun 1915-1945", Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014. tidak dipublikasikan.

Ignatius Haryanto. *Indonesia Raya Dibredel*. Yogyakarta: LKIS, 2006.

Im Halimatussadiyah. "Manajemen Redaksi Pers Islam: Studi Terhadap Majalah Muslimah", Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005. tidak dipublikasikan.

Indah Suryawati. *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

- Leirissa,. dkk. *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: CV. Defit Prima Karya, 1996.
- Lembaga Pustaka dan Dokumentasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Dinamika Pemikiran Islam dan Muhammadiyah: Almanak Muhammadiyah tahun 1997 M/1417-1418 H*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.
- Manullang. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1963.
- Marwati Djoened & Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1993.
- Mohtar Mas' oed. *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971*. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Morissan. *Teori Komunikasi: Individu Hingga Massa*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Muhammad Shokheh. *Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi: Relasi Islam-Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998*. Semarang: UNNES Press, 2008.
- Nurudin. *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Onong Uchjana Effendy. *Ilmu Komunikasi: Teori dan Praktek*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1984.
- _____. *Kamus Komunikasi*. Bandung: Mandar Maju, 1989.
- Purnomo, Agus. "Analisis Isi pada Kolom Khotbah Jum'at di Majalah Suara Muhammadiyah (edisi Juli 2002-Juni 1003)", Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2004. tidak dipublikasikan.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo, 2010.
- Sarlito Wirawan. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali, 1984.
- Septiawan Santana. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Obor, 2005.

- Slamet Riyanto, dkk., *Kamus Inggris-Indonesia Lengkap, Jelas, Mudah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Suherman Rosyidi. *Pengantar Teori Ekonomi: Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Suwarno. *Muhammadiyah sebagai Oposisi: Studi tentang Perubahan Perilaku Politik Muhammadiyah Periode 1995-1998*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Yosal Iriantara. *Manajemen Media Massa*. Banten: Universitas Terbuka, 2014.
- Yulius Eka Agung. *Manajemen dan Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Yuyun Nailufar. “Studi Tentang Materi dan Metode Dakwah Majalah Suara Muhammadiyah Yogyakarta (Analisis Isi Rubrik Hikmah Periode 2004)”, Skripsi Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2005. tidak dipublikasikan.

Jurnal:

- Fatih Gama Abisono, “Dinamika Pangan Orde Baru: Otonomi Negara Vs Pasar Global, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, Volume 5, no. 3, Maret 2002.

Majalah:

- Suara Muhammadiyah*, No. 1 & 2/th. 46/Januari 1966.
- Rencana Suara Muhammadiyah* no. 6/th. 38/Maret 1966.
- Suara Muhammadiyah* no. 7&8/th. 38/April 1966.
- Suara Muhammadiyah*, no. 15 & 16/th. 46/Agustus 1966.
- Suara Muhammadiyah* no. 17/th. 46/September 1966.
- Suara Muhammadiyah* No. 3/th. 47/Februari 1967.
- Suara Muhammadiyah*, no. 6/th. 47/ Maret 1967.
- Suara Muhammadiyah* no. 10/47/Mei 1967.
- Suara Muhammadiyah* no. 13&14/th. 47/Juli 1967.

Suara Muhammadiyah, no. 1/th. 48/DJanuari 1968.

Suara Muhammadiyah no. 4/th. 48/Februari 1968.

Suara Muhammadiyah No. 12/48/Juni 1968.

Suara Muhammadiyah no. 1-2/49/Januari 1969.

Suara Muhammadiyah no. 6/th. 49/ Maret 1969.

Suara Muhammadiyah no. 7-8/th. 49/ April 1969.

Suara Muhammadiyah no. 10/th. 49/Mei 1969.

Suara Muhammadiyah no. 12/th. 49/ Djuni 1969.

Suara Muhammadiyah no. 13/th. 49/ Djuli 1969.

Suara Muhammadiyah no. 15/th. 49/ Agustus 1969.

Suara Muhammadiyah no. 19-20/th. 49/ Oktober 1969.

Suara Muhammadiyah no. 21-22/th. 49/ Nopember 1969.

Suara Muhammadiyah no. 1-2/th. 50/ DJanuari 1970.

Suara Muhammadiyah no. 3/th. 50/Februari 1970.

Suara Muhammadiyah no. 5-6/th. 50/ Maret 1970.

Suara Muhammadiyah no. 9-10/th. 50/ Mei 1970.

Suara Muhammadiyah no. 12/th. 50/ Djuni 1970.

Suara Muhammadiyah no. 15/th. 50/ Agustus 1970.

Suara Muhammadiyah no. 19-20/th. 50/Oktober 1970.

Suara Muhammadiyah no. 1/th. 52/ DJanuari 1972.

Suara Muhammadiyah no. 11/th. 52/ Djuni 1972.

Suara Muhammadiyah no. 16/th. 52/Agustus 1972.

Suara Muhammadiyah no. 23/th. 52/Desember 1972.

Suara Muhammadiyah no. 24/th. 52/Desember 1972.

Suara Muhammadiyah no. 1/th. 53/Januari 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 5/th. 53/Maret 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 10/th. 53/Mei 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 11/th. 53/Juni 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 14/th. 53/Juli 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 15&16/th. 53/Agustus 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 19/th. 53/Oktober 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 22/th. 53/November 1973.

Suarah Muhammadiyah no. 23/th. 53/Desember 1973.

Lihat *Suarah Muhammadiyah* no. 1/th. 54/Januari 1974.

Suarah Muhammadiyah no. 2/th. 54/Januari 1974.

Suarah Muhammadiyah no. 3/th. 54/Februari 1974.

Suarah Muhammadiyah no. 9/th. 54/April 1974.

Suarah Muhammadiyah no. 10/th. 54/Mei 1974.

Suarah Muhammadiyah no. 23/th. 54/Desember 1974.

Suara Muhammadiyah, no. 24/th. 75/Desember 1990.

Suara Muhammadiyah, 01/th. 99, 1-15 Januari 2014.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Musthafa W. Hasyim pada tanggal 19 Agustus 2016 pukul 12.54 WIB.

Wawancara dengan Bapak Imron Nasri pada tanggal 22 Agustus 2016 pukul 10.45 WIB.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I:

Interview Guide

Tentang Struktur Yayasan Penerbitan Pers Majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1966-1974

1. *Suara Muhammadiyah* wajah gaya baru ditandai dengan dikeluarkannya SIT Deppen No. 19/SK/DPHM/SIT/1965 tertanggal 2 September 1965, nomor perdananya diedarkan dalam Mukhtamar Muhammadiyah ke-36 pada tanggal 9-15 Juli 1965 di Bandung. Bagaimana struktur yayasan penerbitan pers majalah *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966-1974?
2. Apa tugas-tugas dari bagian struktur yang telah disebutkan di atas?

Tentang Manajemen Yayasan Penerbitan Pers Majalah *Suara Muhammadiyah*

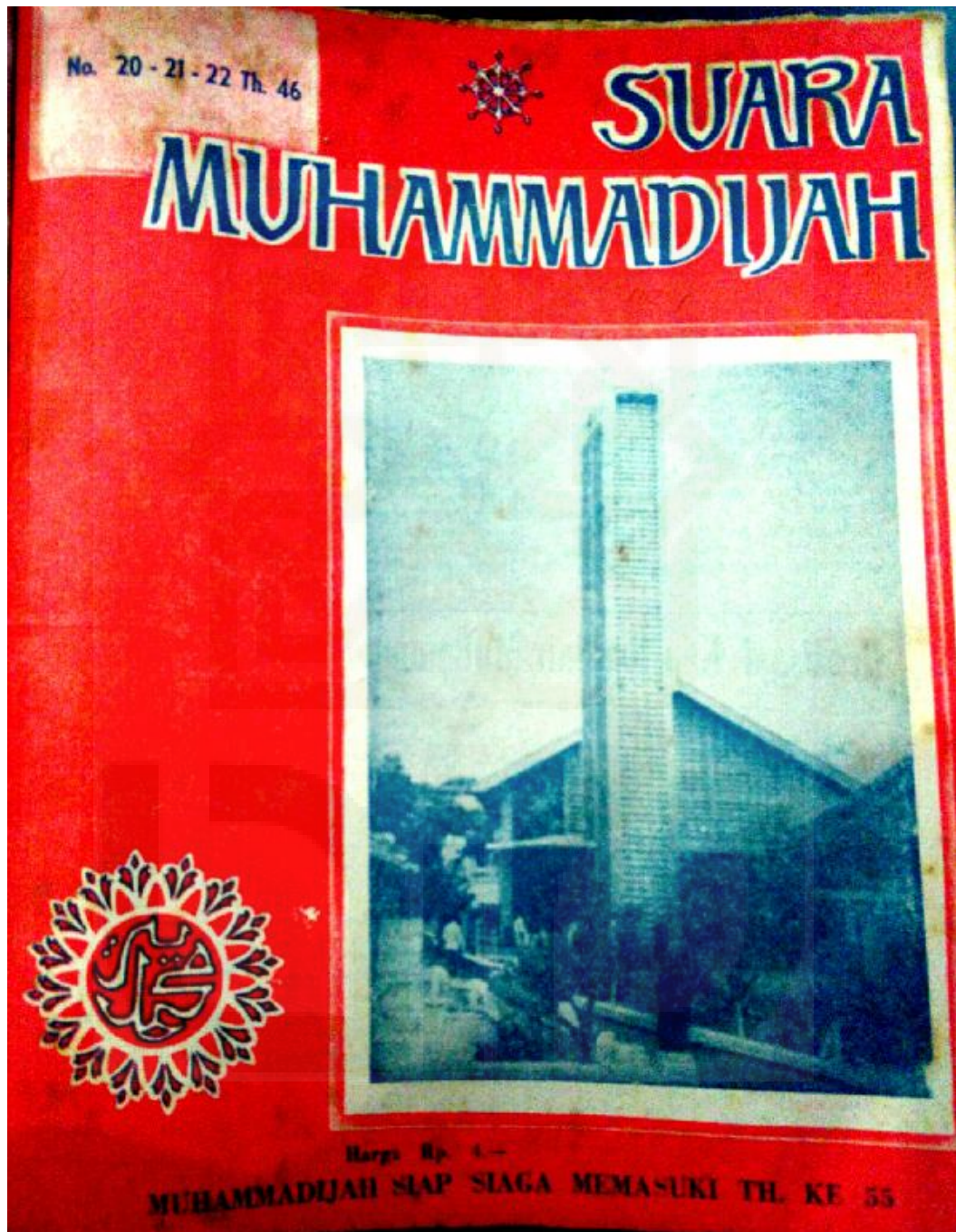
1. Fungsi dan proses manajemen terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan (planning), pengorganisasian, pengarahan (pengawasan) dan pengendalian. Bagaimana proses dan fungsi manajemen yayasan penerbitan pers Majalah *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966-1974?
2. Bagaimana Pembagian Kerja untuk anggota yayasan penerbitan pers majalah *Suara Muhammadiyah* tahun 1966-1974?

Tentang Pemberitaan

1. Bagaimana pemberitaan pada yayasan penerbitan pers Majalah *Suara Muhammadiyah* pada tahun 1966-1974?

Lampiran II:

Halaman Muka Majalah *Suara Muhammadiyah* WGB



Lampiran III:

Contoh Artikel yang Berisi Penolakan Masalah Pembangunan Ekonomi yang Mendiskreditkan Agama dan Ideologi

Suara Muhammadiyah no. 1/th. 52/ Januari 1972



Lampiran IV:

Contoh Artikel yang Berisi Dukungan dalam Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah

Suarah Muhammadiyah no. 15 & 16/th. 53/Agustus 1973

NY. TIEN SOEHARTO
*ditanya mengapa memperlibatkan batik tulis hasil seni
 kerajinan tangan wanita Indonesia. (klise MK)*

EKONOMI

HASIL PELITA DAN PERANAN

INDUSTRI 165/2

KERAJINAN RAKYAT



DRS. SUHARNO

Dia telah menciptakan ka-
 mu dari bumi dan menjadi
 kan kama pemakmurnya.
 (QS Hud 61)

PEMBANGUNAN Lima Ta-
 bua ke-1 yg telah dilaksanakan
 oleh Pemerintah di bawah Presi-
 den Jenderal Soeharto kini telah
 menunjukkan hasil² yang cukup
 memuaskan. Terutama dilihat dari
 perkembangan ekonomi nasional
 dg ukuran GDP (Produk Domestik
 Kasor) yg terus mening-
 kas dari th 1968 sebesar Rp
 478,8 milyar berturut² menjadi
 Rp 573 milyar th 1969, Rp 548,4
 milyar th 1970 dan Rp 586,8
 milyar pada th 1971.

Tetapi keberhasilan tsb di atas
 belum dapat mencapai tujuan
 pokok pembangunan sendiri,

* **DRS. SUHARNO**

yakni kemakmuran yg merata.
 Bahkan kini semakin terasa ada
 nya kedudukan yg "njomplang"
 berhubung dgn perbedaan pen-
 dapatan golongan ekonomi kuat
 dan golongan ekonomi lemah yg
 semakin lebar, pengangguran yg
 semakin meningkat dan berbagai
 keraguan yang lain.

Kenyataan² yg demikian tidak
 saja telah diketahui oleh masya-
 rakat umum, tetapi juga oleh
 Pemerintah yg dewasa ini telah
 mengadakan berbagai persiapan
 untuk mengatasinya. Di antara
 nya dg mengalihkan titik berat
 perhatian dari perusahaan² besar
 dan modern yg pada hakikatnya
 mampu berdiri sendiri, kepada
 perusahaan² kecil dan relatif ter-
 kebelakang yg kebanyakan merupa-
 kan usaha golongan pribumi.

Kebijakan² yang demikian
 tepat, karena tidak saja akan lebih
 menjamin meratanya pendapatan
 dan kemakmuran, tetapi juga
 akan mengurangi ketegangan² so-
 sial yg tidak perlu dan kemung-
 kinan bisa menghambat pelaksana-
 an² pembangunan lebih lanjut.

Namun agar penerapan ke-
 bijaksanaan tsb bisa efektif dan
 sukses, tentu saja sebelumnya ha-
 rus diawali dg penelitian yg men-
 dalam. Di samping itu juga perlu
 mendapat tanggapan positif dari
 masyarakat sesuai dengan urgensi
 obyek yg akan menjadi sasaran.

Seperti misalnya terhadap in-
 dustri kerajinan rakyat yang



memang besar perannya. Baik
 dalam sektor ekonomi maupun
 dalam sektor sosial budaya. Sejak
 zaman dulu, sekarang dan bahkan
 di masa datang. Setidak²nya
 selama corak masyarakat kita
 masih berifat agraris dg tingkat
 penghasilan yg rendah.

**Industri kerajinan banyak
 menyerap tenaga kerja**

Industri kerajinan pada hakikat
 nya merupakan industri yg labour
 intensive. Dg demikian peranan
 nya yg terutama ialah dlm menyec-
 rap tenaga kerja. Khususnya pada
 penduduk pedesaan yg merupa-
 kan 70% penduduk Indonesia.
 Baik mereka yg menganggur atau
 setengah menganggur.

Pekerjaan pokok penduduk pe-
 desaan kebanyakan bertani. Te-
 tapi sewahnya, khususnya di Jawa,
 sempit sekali. Digarap sebentar
 sudah selesai. Apalagi yg meng-
 garap banyak sekali.

Dua sarjana DH Penny dan
 Matri Singarimbun dlm "Bulletin
 of Indonesian Economic Studies"
 Maret 1972 mengungkapkan ha-
 sil penelitiannya di desa Sriharjo
 (Sleman, Yogyakarta), bahwa pen-
 duk desa tsb dalam 1 musim
 hujan (180 hari) hanya menggu-
 nakan waktu 28 hari untuk padi
 nya, 60 hari untuk pekerjaan²
 pembuatan gula kelapa dan non
 pertanian, 102 hari tanpa kegiat-
 an atau merupakan waktu luang.

Dengan waktu luangnya yg
 banyak itu para petani mengga-
 rap pekerjaan² kerajinan. Seperti
 misalnya membuat grabah (ba-

rang kramik), menganyam tikar,
 membuat anyaman dari bambu,
 barang² dari kulit termasuk wa-
 yang, barang kerajinan dari kayu
 untuk topeng dan ukir²-an, tali
 sabut, menenun, membatik, mem-
 buat genting, bagor, barang² dari
 besi (pande) dan banyak lagi jenis
 lainnya.

Dengan peranannya mengsi-
 waktu luang itu, industri kerajin-
 an rakyat berarti berperanan pola-
 dalam pembinaan mental. Karena
 seperti pepatah Jawa mengatakan
 "nganggur bantal setan" (me-
 nganggur bantal setan). Dengan
 demikian orang yang tidak me-
 nganggur akan lebih terjaga dari
 perbuatan² maksiat (termasuk me-
 ramal buntut) dan lain² perbuatan
 yg pada hakikatnya akan men-
 runkan mental seseorang.

Sumber penghasilan devisa

Dari barang² kerajinan tsb. di
 atas sebagian merupakan konsum-
 si rakyat sendiri. Tetapi sebagian
 yg lain merupakan konsumsi wi-
 satawan, yakni sebagai barang
 souvenir. Di samping itu juga se-
 bagai barang ekspor. Dengan kata
 lain merupakan sumber pengha-
 sil devisa yg sangat penting bagi
 masyarakat dan negara.

Menurut salah satu perhitun-
 an, 25% belanja wisatawan asing
 untuk souvenir. Direktorat Jende-
 ral Pariwisata memperkirakan
 belanja wisatawan selama di Indo-
 nesia rata² US\$ 125 seorang. Te-
 tapi dgn perkembangan moneter
 seperti sekarang ini bisa jadi sum-
 capai US\$ 200 seorang. Maka
 untuk th. 1972 misalnya, dengan

Lampiran V:

Contoh Artikel yang Berisi Kritikan tentang Masalah Pengangguran

Suara Muhammadiyah No. 12/48/Juni 1968

DI NEGARA yang sedang berkembang, kemajuan ekonomi sosial selalu menghadapi bertambahnya penduduk sebagai salah satu persoalan yang sangat serikous. Kebanyakan negara Afro-Asia setelah meninjau kemerdekaan selalu terburu dengan kesulitan ekonomi karena pertumbuhan penduduk yang sangat cepat.

Pertumbuhan penduduk memang mengalami kepekaan dalam zaman modern sekarang ini. Dalam masa 15 tahun dari tahun 1950 sampai tahun 1965, jumlah bertambahnya penduduk setiap tahun rata-rata dua kali lebih besar dibandingkan dengan masa perjangan pertama abad 20, dimana penduduk dunia bertambah 600 juta lebih dari pada masa 50 tahun yang mendahulunya. Dalam tahun 1965 saja, penduduk dunia bertambah 65 juta, yang berarti setiap harinya bertambah 180.000 manusia.

Di dalam kondisi demikian, kebanyakan keluarga masih berpegang teguh pada tradisi lama, banyak orang muda, disamping partisipasi aktif anak dalam kehidupan ekonomi keluarga dan kurangnya hak sosial bagi wanita merupakan ciri khas dari masyarakat negara berkembang itu. Namun yang lebih penting dari itu, masyarakat demikian tidak mempunyai stimuli ideologis untuk mengadakan perencanaan keluarga (family planning).

Didjaman kolonial, angka kelahiran yang tinggi (high birth rate) tidak begitu menjolok, oleh karena diimbangi dengan angka kematian yang juga tinggi (high mortality rate). Didjaman pedadjahan pemeliharaan kesehatan penduduk kurang mendapat perhatian. Kelaparan dan kondisi unhygienic (tidak sehat) menyebabkan mudah meluasnya penyakit seperti tular, cholera, malaria, tuberculosis, ds.

Di Togo (Afrika) misalnya, separuh dari anak yang baru dilahirkan mati sebelum mencapai umur satu tahun.

Akan tetapi dengan munculnya alat anti-epidemi yang effective, terutama antibiotika, terjadilah penurunan angka kematian. Hal ini dipercepat dengan likwidasi rezim kolonial dan semi-kolonial, dimana pembangunan negara nasional sangat memperhatikan sanitasi dan service kesehatan.

Berdasarkan "1963 Report on the World Social Situation" (United Nations, New York, 1963), maka prosentase pertumbuhan penduduk di Asia setiap tahunnya (dari 1950-1960) sebanyak 2,11%, sedang di Afrika sebanyak 2,33%. Kenaikannya jumlah penduduk di Asia selama pertengahan pertama abad 20 sebanyak 370 juta sedang masa 14 tahun berikutnya sebanyak 500 juta. Data berikut membuktikan pesatnya kenaikan jumlah penduduk disementara negara Asia dan Afrika setiap tahunnya (dalam jutaan): India -12; Pakistan -2 (lebih); Indonesia -2 (lebih); Philipina -1 (lebih); Thailand -0,9; RPA -kurang lebih 0,8; Nigeria -0,7 (lebih).

SEBAGAIMANA negara2 maju da lainnya, negara kita Indonesia menghadapi problem2 ekonomi dan sosial yang sulit. Problem ekonomi, sosial itu makin bertambah sulit dengan adanya perkembangan penduduk yang pesat dan tidak merata dinegara kita.

Seharusnya, sumber manpower (tenaga manusia) yang bertambah dapat menguntungkan kemajuan ekonomi dan sosial, karena tenaga manusia adalah faktor utama produksi dalam masyarakat. Tetapi kenyataan konkrit dinegara kita (seperti kebanyakan negara2 Afro Asia) adalah sedemikian, sehingga faktor favourable itu malah berubah menjadi anti-thesis bagi kemajuan sosial-ekonomi.

Ekonomi agraria Indonesia yang terbelakang, dengan bentuk pemilikan dan penggarapan tanah yang konservatif, technology pertanian yang primitive dan terutama sekali kurangnya kapital dan tenaga yang qualified (tidak dapat) diperlukan untuk mereorganisir ekonomi sejara radikal, menyebabkan Indonesia mempunyai "kelebihan" tenaga manusia.

Ada tiga masalah fundamental yang harus diperhatikan di dalam memecahkan persoalan penduduk dinegara kita yaitu:

1. Masalah meratakan pebaran penduduk.
2. Masalah perencanaan keluarga (family planning).
3. Masalah pembukaan lapangan kerja baru.

BERTAMBAHNYA jumlah penduduk di Indonesia seharusnya tidak usah menimbulkan problema yang sulit, oleh karena masih banyak sekali daerah "kosong" bila dibanding

kan misalnya dengan negara2 Eropa.

Di Indo-nesia 70 persen penduduknya terdistribusi terpusat di Djawa dan Madura yang luasnya hanya 7 persen dari seluruh daerah Indonesia. Dikedua pulau itu kepadatan penduduknya rata-rata 400 orang per kilometer persegi, dan di beberapa bagian dipantai utara Djawa malahan mencapai 1500 - 2000 orang per kilometer persegi. Sedangkan di lain2 jainnya sangat jarang penduduknya. Kalimantan mempunyai kepadatan penduduk 8 orang per km2 dan Irian Barat 3 orang per km2.

Karena itu adanya transmigrasi sejara besar-besaran untuk meratakan pebaran penduduk kita rasanya sebagai suatu kebutuhan yang sangat mendesak, tetapi yang belum dilaksanakan dengan sepadan dinegara kita.

Mungkin pemerintah telah menjadikannya penting fungsi transmigrasi dalam rangka meratakan pebaran penduduk itu. Namun sejak tahun 1950 sampai 1958 misalnya, Pemerintah hanya berhasil memindahkan penduduk dari Djawa ke pulau2 lainnya sebanyak tahun disekitar 30 ribu orang. Padahal jumlah penduduk di Djawa setiap tahunnya bertambah disekitar 700.000 sampai 800.000 orang, sehingga transmigrasi kecil-kecilan seperti sekarang ini hampir tidak berpengaruh terhadap kenaikan penduduk di Djawa yang makin meningkat.

Kita harus meniadakan, bahwa untuk mengadakan transmigrasi ke daerah2 yang kurang atau kosong penduduknya memang dibutuhkan modal dan expenditure yang cukup banyak untuk dapat mengolah tanah2 yang kosong mengonkan tanah2 membuka hutan lebat, dan menleenggarakan pekerjaan2 sanitasi dan anti-epidemi, khususnya dalam menanggulangi penyakit malaria. Njajaran, kita sangat kekurangan alat dan modal untuk dapat menleenggarakan migrasi antar pulau (transmigrasi).

Dengan demikian mudanya kita maklumi penduduk yang semakin bertambah dinegara

PERSOALAN PENDUDUK DI NEGARA KITA

Diperlukan Pembangunan Sosial & Ekonomi Bangsa

Oleh: Drs. Moh. Amien Rais

Hampir sembilan persepuluh tambahan penduduk ini ada dinegara2 Afro-Asia dan Amerika Latin. Pertambahan penduduk dunia yang terus meningkat (sering disebut "population explosion") terutama sekali memang disebabkan oleh proses perkembangan penduduk dinegara2 Afro-Asia dan Amerika Latin. Dewasa ini, seperti pada masa2 yang lalu, negara2 ini mempunyai angka kelahiran yang tinggi dua atau tiga kali lebih besar daripada di-negara2 industri yang sudah maju.

Hal ini disebabkan, karena struktur sosial masyarakat di-negara2 berkembang sejara relatif masih feodal, tradisional dan primitive. Tingkat pendidikan yang rendah, kurangnya tenaga kebudayaan modern meluasnya beta huruf, bahjaknya sanitasi dan prasangka2 dalam masyarakat, mengakibatkan im-

duk kurang mendapat perhatian. Kelaparan dan kondisi unhygienic (tidak sehat) menyebabkan mudah meluasnya penyakit seperti tular, cholera, malaria, tuberculosis, ds.

Di Togo (Afrika) misalnya, separuh dari anak yang baru dilahirkan mati sebelum mencapai umur satu tahun.

Akan tetapi dengan munculnya alat anti-epidemi yang effective, terutama antibiotika, terjadilah penurunan angka kematian. Hal ini dipercepat dengan likwidasi rezim kolonial dan semi-kolonial, dimana pembangunan negara nasional sangat memperhatikan sanitasi dan service kesehatan.

Berdasarkan "1963 Report on the World Social Situation" (United Nations, New York, 1963), maka prosentase pertumbuhan penduduk di Asia se-

Lampiran VI:

Contoh Berita tentang Kenaikan Harga Pupuk

Suara Muhammadiyah no. 23/th. 54/Desember 1974

INDUK dari hlm 9

Jakarta 1. Perencanaan Menhabiskan bahwa gerakan mahasiswa di Jakarta sampai tgl 12 Januari '74 adalah damai.

Wanita terhadap Hartono Si agar dilacak oleh Majelis Hakim yg dikawal oleh Sibaruan smpada hari Kamis tgl 12 Des '74.

Harga Pupuk Naik

SIDANG Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional di Bina Graha dipimpin oleh Presiden Selasa tgl 19 Nopember '74 telah menetapkan lima kebijaksanaan pokok ekonomi. Yaitu mengadakan penyesuaian harga pupuk, penyesuaian besaran paket kredit Bimas menyederhanakan peyaluran pupuk, menyesuaikan harga pembelian padi dan gabah oleh BUUD (KUD) dan Bulog serta mengendalian harga beras dan meningkatkan penyediaan beras di pasar umum.



MENPEN MASHURI

Dengan kebijaksanaan itu maka mulai tgl 20 Nop '74 harga penjualan pupuk urea dan DST 40 dari Rp 40 menjadi Rp 60 per kg. Pupuk DAT dari Rp 55 menjadi Rp 83,50 per kg. Dan pupuk NTK dari Rp 39 menjadi Rp 60 per kg.

Harga pembelian padi dan gabah mulai 1 Februari 1975, padi kering lubang di desa dari Rp 70 menjadi Rp 45 per kg.

Cuma menghindari pembelian atau pembelian melalui sistem sjon dan melojaknya harga beras di pasaran umum, kepada petani di berikan penyuluhan melalui Kontak Tani siaran pedesaan dan pen. Demikian antaranya keterangan Menpen Mashuri sebagai sidang.

Yasser Arafat Di Depan MU PBB

BERITA luar negeri yg paling menarik perhatian selama bulan Nopember '74 ialah tentang datangnya delegasi PLO yg di pimpin sendiri oleh Yasser Arafat di New York dan kemudian berbicara di depan sidang umum MU PBB.

Pihak orang Yahudi di AS menjadi amat peasaran karena kunjungan Yasser itu dan pemimpin sebuah organisasi Yahudi yg dinamai Liga Perlawanan Yahudi secara terang2an menyatakan akan membunuh Arafat.

Tetapi delegasi PLO itu tidak gentar terhadap segala macam ancaman itu. Hanya pihak alar keamanan di New York yang menjaga ketat dan mengadakan pengamanan yang ketat. Yasser langsung diterbangkan dgn helikopter militer menuju gedung markas besar PBB.

Dengan tetapan pilot menjaga markas besar PBB dan pesawat helikopter terbang mondar mandir diatas gedung itu, pemimpin PLO yang berusia 46 th itu dgn pakaian cara Arab telah berpakaian di MU PBB. Pidatonya mendapat sambutan tepuk tangan riuh dari anggota delegasi negara yang hadir, kecuali delegasi AS yang diam saja, sedang delegasi Israel meninggalkan sidang, sementara delegasi Afrika Selatan yang dilarang untuk menghadiri sidang nongkrong di luar sidang.

Yasser beres bagi pemben tuhan suatu Negara Palestina merdeka, dimana orang Yahudi, Kristen dan Islam hidup ilim suasana

Bersambung ke hlm 13



SNAPSHOT Barangkali Anda Penulis Khat ?

SALAH SATU kesenian yg lahir dari raihan Al-Quran ialah tulisan khat. Berbagai corak dan gaya tulisan khat ini dari Al-Quran menghibur kalbu Karbani, manak, makam dan juga dihidupkan kembali. Pada satu segi, khat ini merupakan kreativitas estetik manusia yg dimungkinkan oleh sifat lentur dari huruf hijayah. Pada segi yg lain, dapat merupakan alat peragaan edukatif bagi anak2 untuk meneliti dan meneliti Al-Quran. Apakah sudah bisa fikiran untuk me ngembangkan seni tulisan khat ini pada sekelebat Islam? Apakah akan bisa terbantu tanggapan dalam arus kelolaan kita?

Apa yg tertera dalam foto ini ialah sketsa karya pale makam Susan Kalijaga di Kadilanga Jember.

(Foto R.D.S. Sumardi)



YASSER ARAFAT
tak gentar ancaman Yahudi,
bicara di MU PBB

Tetapi delegasi PLO itu tidak gentar terhadap segala macam ancaman itu. Hanya pihak alar keamanan di New York yang menjaga ketat dan mengadakan pengamanan yang ketat. Yasser langsung diterbangkan dgn helikopter militer menuju gedung markas besar PBB.

Dengan tetapan pilot menjaga markas besar PBB dan pesawat helikopter terbang mondar mandir diatas gedung itu, pemimpin PLO yang berusia 46 th itu dgn pakaian cara Arab telah berpakaian di MU PBB. Pidatonya mendapat sambutan tepuk tangan riuh dari anggota delegasi negara yang hadir, kecuali delegasi AS yang diam saja, sedang delegasi Israel meninggalkan sidang, sementara delegasi Afrika Selatan yang dilarang untuk menghadiri sidang nongkrong di luar sidang.

Yasser beres bagi pemben tuhan suatu Negara Palestina merdeka, dimana orang Yahudi, Kristen dan Islam hidup ilim suasana

Bersambung ke hlm 13

Lampiran VII:

Artikel tentang Perkembangan Majalah *Suara Muhammadiyah* WGB*Suara Muhammadiyah* no. 15 & 16/th. 46/Agustus 1966

1007

46 Tahun „Suara Muhammadiyah” dan 1 Tahun Wadjab dan Gaja Baru

Oleh: H. Ahmad Basuni B.A

SEBELUM MASUK KE pada menguraikan sekadar nja tentang kisah tjerita „Suara Muhammadiyah” dengan istilah wadjab dan gaja baru yang berusia 1 thn, baik lebih dulu menurut apa yang saja ketahu, diterangkan tentang „SM” sebelum nja, terutama yang mengenai djasa dari „SM” dengan pelopor dan karyawan

nja, yang dalam keadaan bagaimanapun tetap ulet dan tabah mengemukakan dan meneruskan terbitnja „SM”

Karena djasa dan perjuangannya mereka itulah, maka „SM” yang diterbitkan pada tahun 1920 hingga kini mentjapai usia 46 tahun (jadi bukan baru 38 tahun seperti yang tadnja kita ketahui).

Pelopor dan karyawan „SM” itu, ada yang sudah berpulang kerahmatullah dan masih ada yang hidup, disamping sudah tua dan uzur ada yang masih muda dan gagah tetap aktif didalam Muhammadiyah.

Kami peringat dan harga djasa dari pelopor „SM” yaitu alm. K.H. Fachrud-din sebagai Pemimpin Redaksi „SM” yang pertama. Kami peringat dan narwai djasa dari bapak H.A. Hanje sebagai Pem. Red. „SM” mulai tahun ke-2 yang kini masih hidup tetapi sudah tua dan uzur. Kami peringat dan harga djasa alm. K.H. Dahlan sendiri (bapak dan pendiri Muhammadiyah), alm. H.M. Hjsjam, alm. H.M. Mochar, alm. R.H. Djalil, alm. D.M. Siradj, alm. Ng. Sumadirdja, alm. Ng. H.M. Djojogugito dan bapak K.R. H. Hadjid yang sudah tua sebagai Anggota Redaksi, alm. H.M. Ma'ru' bin A' dan Achsan B. Wadana sebagai Administrasi, pada tahun2 pertama.

Kami peringat dan harga djasa dari pengemudi „SM” sebandujnja spj. K.H.M. Jusnus Anies, H.Mh. Mawarati, H.M. Djindar Tamimy, Djar nawi Hadikusumo, Letkol Drs. H. Bakri Sjahid, M. Dahlan Mgn, Dr. H. Baried Is-hom, H. Amien Sjahri, Asdi Nardju, Moh. Isa Jr. dan H. dajat Noor yang menjadi Redaksi „SM” sebelum dan sesudah zaman Djepang dan masa kemerdekaan. Kami peringat dan harga djasa sdr M. Djaldan Badawi sebagai Sekretaris Redaksi, bapak M. Da' Jusak, M. R. dha Anies, Hasan Bilatonga dll sebagai tenaga Adminis-

trasi. Kami harga pula djasa bapak Tjirsubono sewaktu menjadi pemimpin Perj. „Persatuan” yg men-tjajak „SM”

Dengan telah berusnja „SM” selama 46 tahun, yaitu mulai terbit tahun 1920 tsh, yang berarti „SM” terbit 8 tahun setelah berdirnja Muhammadiyah pada tahun 1912, maka dapat kami sebutkan dan tjerat hal2 sbh:

1. Dengan rasa bangga dan sjukur dapat kita njatakan, bahwa „SM” lah satu satunjaja penerbitan pers (Madjallah'sk) bukan sdrja di kalangan Muhammadiyah tetapi bahkan diseluruh penerbitan di Indonesia, yang dapat terus terbit dengan nama yang sama, yaitu „Suara Muhammadiyah” dan diterbitkan oleh organisasi yang sama, yaitu: MUHAMMADIYAH.
2. „SM” lah satu2nja madjallah'sk di Indonesia yang paling pandjang usnjaja dan dapat mempertahankan hidupnja, sanggup mengatasi segala marjam gelombang dan badai yang menjimpa setiap zaman, seperti pandjangnja usja dan rahannja organisasi yang menerbitkannja, yaitu: Muhammadiyah.
3. Dengan terbitnja „SM” yang pertama 8 tahun sesudah berdirnja Muhammadiyah, maka djelaslah bahwa pendiri dan pemimpin Muhammadiyah sedjak semula telah menjadari dan mendalam betapa pentingnja medium pers bagi kepentingan organisasi dan penjangan da'wah, di samping media lainnja seperti: tabligh dengan lisan, pengadjaan, sekolah, madrasah, rumah2 perawatian dan lain2nja.
4. Sedjak terbitnja „SM” ternyata kaum wanita Islam Indonesia mempunjai minat terhadap membuat madjallah'sk dan aktif

Un'unglah ALLAH S.W.T. masih tetap berbelas kasihan kepada Rakjat Indonesia, sebab di Indonesia masih terdapat manusia yang pertjaja dan beriman kepada-Nja, dan masih ada golongan yang berusaha dengan segala djalan untuk menahan meluntjurnja Negara dan Bangsa Indonesia ke djurang yang lebih dalam daripada djurang yang tadnja dikuasakan oleh Presiden.

Dan dalam saat2 yang paling kritis itu, bangkitlah angkatan muda Indonesia, para mahasiswa pelajar dan pemuda Indonesia, yang kini dikenal sebagai Angkatan '66, dengan eksponennja KAMI dan KAPPI. Dengan bangkitnja mereka itu, maka kompas haluan Negara RI kembali diputar kearah yang semestinja, arah yang lurus, yaitu kembali kepada Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus '45, melaksanakan UUD '45 setjara murni, djudjur dan konsekwen. Dan un'uk itu penjakit2 besar yang menghinggapi tubuh Rakjat Indonesia harus dibasmi. Penjakit2 besar terutama ialah PKI dengan sdjan komunisme, marxisme, leninisme nja. Penjakit2 besar lainnja ialah orang2 yang berwatak durja dan aswatama.

Maka, makin bertambah dalam sjukur kepada Allah S.w.t., yang telah menjelamatkan Negara kita yang ber Pan'jasila ini. Dan berterima kasihlah kita kepada angkatan muda, kepada ABRI, kepada pemimpin2 yang djudjur dan kepada seluruh massa progresif revolusioner sedjat, yang telah mendapatkan kesadaran akan bahaya2 besar yg menjengkeram batang tubuh Negara dan telah bangkit berdjuaan untuk menumpas bahaya itu. Perdjuaan ini belum selesai, bahkan baru pada taraf permulaan. Perdjuaan ini harus diteruskan, tidak mandek dan tidak mengulangi djedjak dari beberapa tokoh Angkatan '45 yang semula berdjasa tetapi kemudian lupa kepada arah sebenarnya.

Semoga Allah S.w.t. senantiasaa memberikan taufiq, hidajah dan inajah-Nja kepada kita sekalian, terutama kepada para pemimpin kita dan Angkatan '66. ***

Lampiran VIII:

Contoh Tajuk Rencana *Suara Muhammadiyah* WGB*Suara Muhammadiyah* no. 4/th. 48/Februari 1968

Tajuk Rencana

Hasil Redressing

SETELAH tempo baru melakukan redressing terhadap Kabinet Ampera, belakangan Pd. Presiden Djendral Soeharto telah melakukan redressing pula terhadap DPRGR. Maka, sudnja ialah unuk mengja pai hasil dan karya yang semaksimal mungkin dari Badan Legislatif itu, sesuai dengan peningkatan perjuangn pembangunan yang amat mendesak di negara ini.

Tentang hasil daripada redressing DPRGR ini, masih kita nantikan. Tentang redressing Kabinet Ampera yang tadinya ditunggu dengan harapan baik oleh masyarakat, ternyata tidak memenuhi harapan rakyat itu. Bahkan di bidang keuangan dan ekonomi, menundukkan keadaan yang parah dan berat. Terutama naiknya harga beras dan sukarnja dipat beras itu, apa lagi bagi rakyat yang pendapatannya kecil dan terbasas. Banyak peristiwa2 yg menjedihkan telah terdengar terjdjadi berhubung dengan mahal dan sukarnja beras itu. Di daerah2 yang belum pernah dijimpa ho kini telah terdapat ho seperti daerah Tasimalaja, Tjamis dan Kotamadya Jogjakarta. Jang mati kelaparan pun sudah ada, ja itu di daerah Lampung Utara.

Ketua MPRS Djenderal A.H. Nasution dengan tegas menjatakan, bahwa keadaan ekonomi kita adalah suram. Sasaran pesen dalan inflasi yang 65% tidak terjapai bahkan telah menjapai 115%. Bulan pertama tahun 1968 telah dimulai dengan kenaikan inflasi 39,8%, sedang renjana2ja unuk seluruh tahun 1968 hanya 30%.

Maka, apakah redressing DPRGR sekarang ini akan membawa hasil baik seperti yg dimaksud, seperti ketika Kabinet Ampera tempo baru direress? Tentunya akan didapati bahkan sebetulnja, sebagai yang ternyata dihasilkan Kabinet Ampera.

Jang nyata dari anggota2 baru yang menggantikan anggota lama yang direcah, memang pada dal rancangan anggota baru, kita tidak melihat ketelitian keahlian yang menjolok dan banyak diketahui umum tentang karya dan ketjakaan mereka itu. Dalam soal pembangunan, dibanding dengan anggota2 lama yang direcah. Kita seudju bila yang diganti itu anggota2 yg sudah tua, sudah terlalu lama terus menerus ikut dalam lembaga itu, hingga dengan demikian memberikan jalan dan kesempatan unuk tenaga2 baru. Atau djuga anggota2 yang selama ini malas hadir dalam sidang2, datang di DPRGR sekadar unuk teken daftar hadir dan terima honorarium saja atau radjin datang 'api hadir unuk bungkem seribu basa saja. Tapi diantara yang mengganti ini ada pula kita ketjahu, yang us'ainja pun sudah lanjut. djadi djuga tjisknja sudah uzur, dsamping kita belum tahu sampai djmana nanti keradjanan dan keaktifan mereka melakukan tugasnja.

Dari tambahan anggota baru sebanyak 67 orang, terdapat hampir separo, jaitu 32 orang wakil dari Abri di lembaga legislatif negara itu, sebagai djuga dewasa ini dj setiap djaba'an2 penting dipusat dan daerah, badju hadju memegang peran yg menguntungkan. Suatu keunjikan di Indonesia, yang djuga merupakan usaha sampai djmana djmaksudkan pembangunan di Indonesia dapat djaksanakan bahkan oleh golongan yang dipandang punya wibawa dan kekuasaan (Abri).

Dalam tambahan baru itu, wakil2 umat Islam tidak nampak menjolok, dalam arti yang berasal dari sesuatu ormas yang berafiliasi parpol Islam atau dari ormas dan golkar Islam yang tidak berafiliasi. Memang sebagian besar mereka beragama Islam, tetapi punya gairah unuk memperdjuaungkan kepentingan Islam, itu lain soalnja.

Adapun dari Muhammadiyah dapat djkaya masih tercap berubahan di jumlah anggotanja sebagai semula. Jang terjdjadi ialah penggantian 3 anggota, jaitu bapak2 Marzuki Jatim, Sardiono dan K.H.M. Junus Anies dengan bapak2 H. Usman Muttaqieff, A. Wahab Razak dan A. Mukti SH masing2 dari Surabaya (Djatim), Makasar (Sulsel) dan Medan (Sumut). ***

SUARA MUHAMMADIYAH

PEMBAWA TJITA PER-SJARIKATAN DAN DA'WAH ISLAMIAH

*
Diperbitkan oleh PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

*
Pemimpin Umum/Pemimpin Red.
(Penanggung Djawab)
PROF. K.H. FARIED MATRUF

*
Wakil:
H. AHMAD BASUNI B.A.

*
Dewan Redaksi
MOHAMMAD DIPONEGO
RO. AHMAD SJAFI MAALIF
RIF. HERMANSJAH NAZIRUN, ABDULLAH SABDA.

*
Pemimpin Tala Usaha
ABDULLAH SABDA B.A.

*
Sekretaris:
HERMANSJAH NAZIRUN

*
Terbit 2 kali sebulan
Harga Langganan/Eksterior
11 ekpl. Rp. 15.-- unuk seluruh Indonesia, Berlangganan se-
kurangnja 3 bln.

*
Bankier: B.N.I. Unit III

*
Harga iklan 1 kali moat
1 halaman Rp. 2000.--
1 1/2 " " 1200.--
1 1/3 " " 1000.--
1 1/4 " " 800.--
1 1/5 " " 700.--
1 1/8 " " 600.--
1 1/16 " " 400.--

*
Alamat Redaksi dan Tala Usaha
DJI. K.H.A. DAHLAN 99
Tlp. No. 115-JOGJAKARTA

*
Anggota SPS
Izin Deppen 196/R/Sk
DPHM/SIT/1965 (gl. 2 Sep-
tember 1965

GAMBAR KULIT
KA'BAH DI MASHDIDU
HARAM MAKKAH KEA-
RAHNJA UMMAT ISLAM
BERQIBLAT DIWAKTU
SHALAT DAN DI SEK-
TARNJA BERTAWAJ

Lampiran IX:

Contoh Kolom Komentar di dalam Suara Muhammadiyah

Suara Muhammadiyah No. 2/th. 54/Januari 1974

KOMENTAR

MENGULANG PENGALAMAN PAHIT

DALAM pidato kongres DPR tahun 1973 di depan sidang DPR, Kepala Negara mengemukakan bahwa mulai April '74 akan dimulainya Pelita II, gaji pegawai sipil - Abri diturunkan. Apa yang terasa amat menggempakan adalah bahwa semua hal itu ditempuh oleh pemerintah dengan keadaan sosial-ekonomis yang kurang menguntungkan. Di samping soal, masalahnya betidakkah para mahasiswa-pemuda hingga mereka mengadakan gerakan demonstrasi. Selain di bidang ekonomi, urutannya kenaikan² harga yang tidak cukup ditangani oleh pemerintah agar dapat tercekam serendah-hal.

Gambaran demikian sesungguhnya nya cukup menggambarkan kelesuan di kalangan rakyat, yg banyak di antara mereka bukan tergolong ke kategori pegawai negeri. Umumnya manusia-manusia ini lebih arif dalam masalah kebutuhan hidup sehari-hari, sampai dengan tahap a-las dan ekonomi mereka berkecukupan hanya ada peningkatan gaji akan berarti kenaikan harga². Secara pribadi mereka melambatkan langkah, apa kah pemerintah sengaja "menghancurkan" pada para pedagang untuk menaikkan harga barangnya, hingga rakyat terbanyak akan se namanya terganggu oleh masalah sosial-ekonomis yg tidak menguntungkan kan?

Sangatnya, jika dg kenaikan gaji ini pada hal/halunya tidak akan menimbulkan keuntungan - sebab dg kenaikan itu telah ser lah lebih dahulu muncul harga² baru yg lebih tinggi - apakah tidak lebih bijaksana standarnya pemerintah menahan diri untuk tidak menaikkan gaji tersebut? Keuntungan apa kah dari kenaikan itu jika begitu terus terlewat harga² telah men dahului naik? Terlebih standarnya apa dalam jangka 4 bulan (Juni 01-April) harga semakin menanjak, bahkan hal itu berarti bahwa rakyat (atau pegawai sipil-Abri) yg belum menerima kenaikan gaji sudah harus mengorbankan belanjanya lebih dari se

mesinnya kebutuhan sehari-hari? Defisit anggaran rumah tangganya tiap ke luarga yg berlangsung selama Januari-April bukankah tidak mempunyai akibat.

Yang patut tidak mengerti, kenapa kesalahan semacam itu masih saja selalu ditempuh oleh pemerintah tahun demi tahun? Mengapa pemerintah kurang menyadari secara benar², bahwa tiap kenaikan gaji telah berakibat kenaikan harga² Mengapa justru itu yg ditempuh, dan bahkannya usaha² untuk menahan harga² kebutuhan pokok rakyat agar dapat tercekam serendah mungkin? Dan mengapa justru tel lah dalam keadaan yang kurang menguntungkan?

Pikiran lain lagi yang timbul adalah: apakah pemerintah hanya memandang bahwa rakyat yg harus diperbaiki dan diperbaiki nasib nya - al-alah- hanya pegawai sipil-Abri, sedang rakyat terbanyak se bagai pegawai swasta, tukang becak, buruh² pabrik, kurang mendapat perhatian? Apakah salah langkah serupa ini akan terus saja ber berlangsung, hingga usaha untuk men ciptakan ratanya kemakmuran jadi semakin jauh dari harapan rakyat?

Kenaikan gaji sebanyak itu akan berarti sebagai usaha "mengembalikan" langkah² perbaikan ekonomi yg sudah agak berhasil pada tahun² belakangan. Dan itu berarti me nulusi lagi langkah² baru, yg se benar-benarnya telah ditempuh pada saat² penekanan turunnya harga² di masa yang lalu.

Rakyat terbanyak berharap pada pemerintah agar "komando" kenaikan atau harga² lewat kenaikan gaji ti dak akan senantiasa diulang². Alangkah ironisnya jika kenaikan² itu dilakukannya dg kurang terencana nya lapangan kerja untuk menam pengun mahasiswa-pemuda, hingga menyebabkan mereka bergerak. Meng anak ematkan pegawai negeri dan mengancam tiribah rakyat terbanyak yg tidak berpengaruh tetap, rana nya bukanlah menjadi maksud pe merintah. Karena itu adalah tugas ahli² ekonomi untuk menemukan jalan, dg cara bagaimana agar ke naikan gaji tidak akan berakibat naiknya harga² kebutuhan pokok rakyat.

Dapatkah ahli² ekonomi kita menciptakan hal yg semacam itu?

CARA MEMPERBAIKI

ADNAN Boyung Nasution SH, yg bersama 18 orang yg lain ke berapa waktu yg ditangkap, se belannya menyatakan bahwa, "Tin dahar² kekerasan yg bersifat anti-bhri dari siapapun juga, baik masyarakat maupun penguasa, tidak dapat dibenarkan dan harus dilentik kan segera, karena hal itu bukan saja merusak harmonis perjuangan, bahkan tambah merusak dan menghancurkan kehidupan masyarakat dan negara yg justru hendak kita perbaiki bersama²."

LEPAS dari motif apapun yg bersifat politis, persegatan demi-bias adalah baik. Sebab telama ini yg terlihat, banyak tokoh apa kah dari eselon atas atau bawah bermasing² mulai "pandai" untuk tidak dapat menahan diri. Main kekhawanan dan kekerasan merupa kan gejala² yang nyata.

Lalu di manakah sumber dari semua ini? Yakni pada sebab² yg sudah amat klasik: tudanya saling pengerintian² itulah sebabnya, barang

kali yg mendorong ke "Mata Kiri" Yogyakarta menyatakan bahwa di saat ping pemerintah menganti/lansekn² yang bersifat ke luar, "Hendaknya langkah² itu dilengkapi dg langkah ke dalam, terhadap aparat pem erintah". Sedangkan keinginan dari "MK" dapat sepenuhnya dilaksanakan kan pemerintah, jika yakin bahwa heresahan seperti yg terjadi telama ini tidak akan meletus.

Karena ketetapan mendukung per ayatuan DPP PPT yg mengkerap kan agar pemerintah menanggapi aspirasi masyarakat secara positif dan mengoreksi ke dalam. Ini me ngandung arti, bahwa hendaknya siapa saja pendal "menahan diri". Kalaupun bukan merupakan itat² nya jalan penyelesaian keteguhan sosial-ekonomis sekarang. Yang di perbaiki adalah: masing² secara tulus harus mampu menciptakan ke adaan yg lebih menguntungkan ter selenggaranya keadilan dalam ka nyak bidang kehidupan. Dan itu mengandung arti, misalnya bahwa korupsi harus benar² diberantas. Bahwa menyalaq gunakan wewenang juga harus dikendalikan. Deb

SUDAH TERBIT

BUKU

ALMANAK MUHAMMADIYAH

Tahun 1394 H. / Tahun 1974/75 M.

Harganya disesuaikan dengan daya kemampuan masyarakat dan pentingnya kandungannya, yaitu: Rp. 500,- (Lima Ratus Rupiah) per Buku.

Kedadaan Buku Almanak:

- a. Tebal 320 halaman, ukuran 14 x 16 cm.
- b. Kertas halus HHI.
- c. Omplag (kulit) dicetak offset.

PIMPINAN Wilayah/Daerah/Cabang Muhammadiyah, Toko² Buku dan masyarakat umum, sudah dapat memesan Buku Almanak Muhammadiyah tsb. dengan ketentuan sbb.:

- a. 1 - 10 buku, tanpa potongan (korting), tambah ongkos kirim 10 % sedikinya Rp. 100,- per buku.
- b. 11 - 30 buku, potongan 10 % tambah ongkos kirim 10 %
- c. 31 - 50 " " 20 % " " " 10 %
- d. 50 buku ke atas, " 30 % " " " 10 %

e. Pesanan harus disertai uang barga kontan.

PESANAN/kiriman uang pada:

PP MUHAMMADIYAH
MAJLIS PUSTAKA
Jl. KHA Daklon 99
YOGYAKARTA.

Lampiran X:

Contoh Berita tentang Peristiwa 15 Januari 1974

Suara Muhammadiyah no. 3/th. 54/Februari 1974



PERISTIWA
15 JANUARI

PERISTIWA yg terjadi pada tanggal 15 Januari di Jakarta dgn telah berlangsungnya demonstrasi besaran yg diikuti dgn pembakaran² dan perusakan terhadap kendaraan bermotor busana Jepang, Protes Sensoi, gedung PT Astra dll, merupakan peristiwa yg menjadi perhatian bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia. Oleh demonstrasi dan pembakaran² tsb Laksus Pangkajenejendro Jaya me nyatakan bahwa pada jam malam utk kota Jakarta dan sekitarnya. Kemudian mesyuarat pula penutup an semua sekolah² di Jakarta ma lai dari SD hingga perguruan tinggi selama beberapa hari.

Tindakan pengamanan dan "inventaris" lebih meluas lagi. Hari berikutnya beberapa orang tokoh mahasiswa, dosen dan cen dibawahi ditahan. Semantara itu harian, "Nusantara", KAMI, ABA, IDL, INDONESIA RAYA, JAKARTA TIMES, Minggu PE MUDA INDONESIA, WE NIANG dan Minggu MAMASISWA INDONESIA (Bandung) diisat surat izin cetak dan surat izin terbitnya. Kemudian Harian PEDOMAN dan Minggu EX PRESS diisat surat izin cetaknya.

Pada tgl 15 Januari tsb berlangsung perhimpunan resmi antara Presiden Suharto dan PM Tanaka dari Jepang. Adanya demonstrasi yg s.l. dimaklumkan utk menca nta komisi modal Jepang itu telah "menca nta" pemertuan yg menyangkut pembakaran penting tsb. Dalam sejarah pemerintahan tsb² lenggaman Indonesia maka manna kunjungan Tanaka itulah yg paling suram.

Dari pada hari itu pula ben dora merah putih yg banyak ber kibat di depan kantor² resmi di turunkan setegah tiang, semu tara bendera Jepang diturunkan sama sekali.

Hingga tolak ini diturunkan tidak kurang dari 700 orang te lah ditandu/ditangkai dgn berba gai tindakan. Tidak ayal lagi ski bat demonstrasi/pembakaran tsb, telah menelan puluhan milyar rupiah.

Pada hari² berikutnya gelomb bang² demonstrasi telah terjadi pula di kota² Yogyakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang dll.

Kalan pada th 1966 kaum de monstrasi meneriakkan "Tritura maka di tengah² situasi yg meng hangat di bukuti itu Jikman dangkan pula Tritura (Tri Tun tutan Hari Norani Rakyat) bara.

TRITURA 1974 itu adalah:
Pertama BUBARKAN ASPRI,
Ke dua TURUNKAN HARGA
dan Ke tiga BERANTAS KO RUPSI.

JALANNYA PERISTIWA
15 JANUARI

Pada hari Selasa tgl 15 Januari ketika di Istana Negara diadakan pembicaraan resmi antara Presi den Soeharto dgn PM Jepang Tanaka ratusan pelajar dan maha siswa berkumpul di sekitar lapang an Monas. Jumlah itu kemudian semakin bertambah menjadi ribu an. Tujuan semula agaknya ada lah utk mengadakan demonstrasi ke itanan guna menyangkutkan tun tutan mereka. Tetapi dgn adanya pengagaan ketat yg terdiri dari berlagi ketatan ABR I gelomb bang massa mahasiswa dan pela jar itu dapat dibendung.

Ribuan massa mahasiswa/pela jar itu akhirnya dapat didesak hingga perapatan Air Mancur. Dari situ para mahasiswa berla ri² menyusuri Jalan Merdeka Barat menuju perapatan dekat Dep. Per dagangan. Di sini mereka kem bali dibidang oleh kesatuan² ABR I yg terdiri dari satuan² KKO, Ko pangat, Raiders dari Kodan Jaya dan pasukan Kejang Silivangi.

Tertahan dengan barikade yg berlapu² itu para mahasiswa meng adakan aksi duduk sambil ber nyanyi². Lagu "Halo² Bandung", "Maju Tak Gentar", "Padamu Negeri" serta yell² menggera. Lebih kurang sejam kemudian mereka didesak kembali oleh alar² negara hingga para demonstran menga liri ke jalan Majapahit. Se lanjutnya terus ke arah Harmoni dan berbelok ke Jalan Juanda. Di sini mereka terhempung lagi oleh satuan ABR I dan mereka terus menga liri menuju Puncu Air. Di sini jumlah kaum demonstran telah menjadi semakin besar.

Kemka massa mulai berkumpul di sekitar Lapangan Monas di Fak. Kedokteran UI nampak telah ber kumpul pula mahasiswa² yg siap melakukan demonstrasi. Ketika itu helikopter nampak melayang² di atasnya utk mengamati gerak an² mahasiswa. Ratusan mahasi wa berkumpul dengan memakai jaket² kuning (Jaket Mahasiswa UI) serta bendera² Jepang yang bundaran merahnya diganti dgn tengkorak² merah. Ketika helikop ter itu mengkilang, mahasiswa mulai menyangkutkan lagu² militan dan mulai menyusun barisan. Spanduk² berjejeran di manna, berbunyi "Menerima Tanaka = Menerima Kolonialis" - "Ga nyang Kolonialis antek² Je pang". Sedang slogan yg berbunyi "Mahasiswa militan, Tana ka, you genit deh. Bagero" diangkat beraman² menyusuri ja lanan.

Para mahasiswa itu mengada kan mars didahului dgn semacam "Pasukan Komando" yg berbaris jarakan tameng² dengan gambat tengkorak. Di belakangnya menyul barisan merah putih. Hanya beberapa kantor memasang bende ra Merah Putih menyambut Lun Juanga tamu. Maka kantor² jera sepanjang route mars demonstran menjadi sasaran. Bendera² merah putih di depan kantor² itu diturukan setegah tiang.

Mars yg bergerak dari Fak. Kedokteran ini s.l. dipimpin oleh

Lampiran XI:

Artikel tentang Konsep Ampera di dalam *Suara Muhammadiyah**Suara Muhammadiyah* no. 9/th. 46/Februari 1966

Konsep „Operasi Ampera“.

Penstabil Ekonomi

(III - Habis)

Penjelamat Revolusi

Oleh : Drs. Tohari Musnamar.

1) Masalah "spare parts" merupakan masalah yang akut pada bidang pengangkutan / mobil pada waktu ini. Bukan saja karena sangat mahal harganya tetapi juga karena tidak ada barangnya. Untuk mengatasi kebutuhan spare parts yang terus-menerus, kami mengusulkan: hendaknya dari jenis spare parts yang mungkin dan mudah pembuatannya, supaya diproduksi didalam negeri. Misalnya: cut out, acen, shock absorber, skrup baut, peer, condensor, coil, engine mounting, metal dan sebagainya.

Tjaraanya, kita membeli mesin "pembuat spare parts" tersebut. Dengan demikian kita setapak demi setapak dapat berdikari dalam hal spare parts. Ini jauh lebih hemat.

2) Hendaknya jangan mengimpor barang2 yang telah dibuat didalam negeri, meskipun barang2 buatan dalam negeri tersebut kwalitatif belum memuaskan. Apabila kwantitatif barang tersebut belum mentjukupi kebutuhan, hendaknya produsen dibantu dan distimulir agar meningkatkan hasil produksinya, atau kalau perlu diadakan investasi baru. Disamping itu produsen harus menjaga dan meningkatkan mutu produksinya.

3) Menstimulir diperbanjaknja „penemuan2 baru“ d'bidang alat2 produksi, yang akhirnya menjadi hak patent. Setiap tahun kepada mereka yang dapat menemukan „Aiptaan baru“ yang berjasa bagi produksi, yang orisinal, dan yg efektif, kepadanya diberikan gelar sebagai „Putera Kreatif“ utk tahun itu.

4) Untuk benar2 menudju kearah berdikari d'bidang ekonomi, hendaknya Projek2 Vital yang bermanfaat bagi banjak sektor ekonomi dan pembangunan segera diseleksi dan dimanfaatkan. Projek2 jg kami maksud a.l. ialah Projek Djaluhur Projek Asahan, Projek BadjaTj'legon, dsb-nja.

Menstabilkan ekonomi/harga

1) Policy cost-accounting dapat dibenarkan, dengan tjatatan: bahwa penentuan kenaikan tarif2 dan harga2 harus d'rundingkan dan ditentukan bersama2 antara Perusahaan dan Pemerintah. Ketentuan tsb. perlu untuk menjaga kesimpangsiuran tarif2 dan harga2 sehingga tidak terkendalikan. Maka dalam hal ini Pemerintah bertindak sebagai pengontrol dan sebagai koordinator agar kestabilan harga terjamin, agar kenaikan tarif/harga dari suatu perusahaan seimbang dengan situasi tarif/harga pada sektor2 yang lain.

2) Untuk sedikit menghambat derasnja arus inflasi yang terjadi pada akhir-akhir ini, sejojanya uang Rp. 25,- (uang baru) keatas segera ditarik kembali dari peredaran, diganti dengan uang petjahan yang lebih kecil.

3) Situasi akhir-akhir ini toko-toko banjak kosong dan banjak barang2 lenjap dari peredaran. Untuk menghadapi hal tsb. selain supply barang diperbanjak dan dipertjepat, juga pelarangan t'p penimbunan barang2 supaya diperkeras dan diintensifkan. Pemeriksaan diadakan sesering mungkin. Sanksi bagi para penimbun tanpa seizin Pemerintah, seluruhnya disita untuk Negara, tidak hanya sekedar didenda.

Prosedur pemeriksaan penjitaaan harap djuga dikontrol, sebab banjak sekarang terdjadi baarng2 sitaan beb'robah menjadi milik djuru sita sendiri.

4) Kelak setelah suasana kegelisahan-ekonomis sekaran ini agak mereda, sedapat mungkin Pemerintah djuga harus memperhatikan „persediaan“ (ijzerenstock) beras dan sebagainya. Hal itu perlu untuk menghadapi musim2 yang sulit. Sebaiknja Rukun Tetangga dihidupkan kembali dan d'sempurnakan, untuk a.l. dapat digunakan sebagai aparat distribusi apabila se-waktu2 diperlukan. Dalam hal ini mahasiswa/pelajar/pramuka dapat ditugaskan sebagai pengontrol dan pembantu pelaksanaannya d'daerah masing2.

5) Untuk mengurangi kepadatan penduduk di Djawa, hendaknya diperkuat transmigrasi dengan menjomblokan metode transmigrasi di Filipina. Jg prinsipnja: Pemerintah memperindahkan Negara2 sahabat (dengan hanya dari satu Negara) untuk membuka projek2 misalnya di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dsb. Dengan ketentuan: Pemerintah Republik Indonesia djuga memiliki saham2-nja dalam projek tsb., dalam pimpinan penduduk djuga tenaga2 yang ditunjuk oleh Pemerintah R.I. tenaga-buruh d'datangkan dari Djawa dan telah disediakan perumahan serta djaminan-sosial yang lajak. Dalam waktu luang si buruh diberi kesempatan membuka tanah untuk tempat menetap.

6) Masalah pengangkutan: yang menjadi probleml pokok bagi pengusaha2 pengangkutan sekarang ini ialah „spare parts“ yang harganya begitu melonjak tinggi, sedangkan barangnya djarang ada. Meskipun anda'kata bensin gratis dan tarif-pengangkutan Rp. 250,- djauh-dekat, toh djuga belum dapat untuk menutup slijtase. Maka hendaknya dalam waktu dekat ini di-supply „spare parts“ setjukup mungkin. Sehubungan dgn hal tsb. hendaknya policy impor kendaraan-bermotor supaya dit'ndjau kembali, djangan terlalu banjak merk, pabrik dan negara pembuatnja. Harga bensin Rp. 0.50 (ubar) menurut hemat kami adalah tjukup murah djika dibandingkan dengan harga bensin diluar negeri.

Kesimpulan: yang menjadikan masalahnya tarif - pengangkutan adalah spare parts, bukan karena harga bensin.

7) Salah satu sumber kegelisahan kehidupan dewasa ini ialah terdapatnja perbedaan yang menjolok antara kaum „the have“ dan „the have not“ Pada zaman perdjjoangan kemerdekaan dahulu meskipun hidup menderita karena penderitaan itu dip'kul bersama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Emi Mu'taziroh
 Tempat/Tgl. Lahir : Kediri, 21 September 1990
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama / status : Islam / Menikah
 No. Identitas KTP : 350626610990001
 Alamat Sekarang : Kos Hibrida 2, Baciro Gendeng no. 983 rt/rw
 85/20 Yogyakarta
 No HP/WA : 085732288713
 Email : emimutaziroh.sweet@gmail.com



B. Pendidikan Formal :

1. TK Kusuma Mulia Pare Kediri Lulus tahun 1998 Berijazah
2. SD Negeri Bringin Pare Kediri Lulus Tahun 2003 Berijazah
3. SMP Negeri 2 Pare Kediri Lulus Tahun 2006 Berijazah
4. SMA Muhammadiyah 1 Pare Kab. Kediri Lulus Tahun 2010 Berijazah
5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam

B. Pendidikan Non-Formal

- Kursus Bahasa Inggris selama 6 bulan di BEC Pare tahun 2009-2010

Yogyakarta, 15 Nopember 2016

Emi Mu'taziroh